

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Februari IV Tahun 2021 No. 8

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A*

## *Buat Perpres Baru*

*Agar Pencabutan  
Ketentuan Terkait  
Investasi Miras Tak  
Sekedar Wacana*



# Mabuk Investasi, Miras Hendak di Legalisasi

Jujur saja model kebijakan 'test the water' seperti ini seringkali dilakukan oleh Pemerintah. Satu waktu wacana muncul, kemudian memantik reaksi besar maka sikap melandai. Namun tidak jarang dikemudian hari saat cipta kondisi dan narasi sudah tuntas, kebijakan itu di gesa kembali. Bukan kali pertama juga tampuk negara harus menganulir apa yang sudah diputuskannya

Tahun 1978 Drunken Master sebuah film seni bela diri Hong Kong yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping dan dibintangi Chen lung atau Jackie Chan menjadi film terlaris dalam daftar film box office di Hong Kong.

Film Drunken Master menggambarkan seorang pria bernama Wong Fei Hung sebagai pemuda nakal (suka mabuk) yang malas, lucu dan usil. Padahal Wong Fei Hung yang asli dan melegenda didataran tiongkok dikenal selalu serius dan tekun bekerja. Mister of contradiction.

Hari-hari ini kita digemparkan dengan kebijakan Pemerintah yang hendak melegalisasi miras. Datang sebagai sebuah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal. Dalam lampiran menyebut pelegalan investasi miras, meski disebutkan hanya berlaku di empat daerah, namun pada akhirnya berpotensi terjadi di banyak daerah. Sontak memantik reaksi sejumlah kalangan seperti ormas, partai politik, pemuka agama dan akademisi.

Kontraksi ekonomi yang luar biasa, ditambah kehidupan sosial yang berat nampak telah membuat otoritas mengambil jalan pintas yang mudah. Berbekal alasan kearifan lokal dan investasi, miras sebagai barang yang kecil manfaat hendak dipaksakan hadir dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Malas, lucu dan usil.

Tepat satu bulan setelah dikeluarkan, pada tanggal 2 maret 2021 akhirnya Presiden mencabut beleid lampiran

terkait investasi miras. Kita bersyukur bahwa langkah tersebut diambil oleh kepala negara setelah riuh keberatan, akan sulit dibayangkan jika regulasi itu tetap ada. Investasi belum tentu masuk, dampak buruk sudah pasti terjadi.

Agar menjadi catatan pengambil kebijakan. Bagi pemegang otoritas, pembuatan regulasi seperti perpres adalah pekerjaan keseharian yang menuntut ketekunan, kecermatan dan kehati-hatian. Karena darinya berkonsekuensi menghadirkan implikasi yang luas dan dampak yang besar bagi masyarakat. Pembentukan sebuah aturan sejatinya memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Karenanya penusunannya harus utuh dan menyeluruh.

Regulasi ketika diluncurkan pasti memuat resiko dan tidak bisa menyenangkan semua pihak, karenanya harus berbanding lurus dengan manfaat dan kemalahatan yang lebih besar.

Jujur saja model kebijakan 'test the water' seperti ini seringkali dilakukan oleh Pemerintah. Satu waktu wacana muncul, kemudian memantik reaksi besar maka sikap melandai. Namun tidak jarang dikemudian hari saat cipta kondisi dan narasi sudah tuntas, kebijakan itu di gesa kembali. Bukan kali pertama juga tampuk negara harus menganulir apa yang sudah diputuskannya. Tengok saja seperti mendorong revisiUU ITE, namun hingga saat ini naskah akademik dan draft revisi UU-nya belum sampai ke parlemen.

Alih-alih mempercepat, yang ada jadi berkarat.

Kita mengapresiasi pernyataan Presiden yang mencabut lampiran Perpres No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi terhadap industri miras atau beralkohol. Seraya mengingatkan agar segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, dengan menghadirkan Perpres baru dan mempublikasikannya kepada publik.

Sikap ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghentikan polemik yang masih dirasakan oleh banyak elemen bangsa. Semoga dimudahkan menghadirkan kerja-kerja monumental untuk bangsa dan negara. Agar tidak menjadi karya yang memantik kontroversial dan emosional.





Alhamdulillah  
Atas desakan PKS, MUI,  
Ormas Islam dan para  
tokoh Agama serta  
komponen masyarakat lainnya,

# PERPRES MIRAS DICABUT

kumparan.com

Jokowi Izinkan Investasi Miras dan Suara Penolakan dari PKS hingga MUI - kumparan.com

Dikutip kumparan dari lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021, ada 46 bidang usaha yang masuk kategori terbuka dengan persyaratan khusus. 2 hari yang lalu

SINDOnews.com

PKS Nilai Perpres Investasi Miras Sangat Meresahkan

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menilai bahwa

TEMPO.CO

PKS Minta Jokowi  
Batalan Perpres yang  
Singgung Investasi  
Miras

KOMPAS.com

Fraksi PKS Minta  
Perpres Soal Investasi  
Miras Dibatalkan,  
Dinilai Cederai Nilai P...

Suara.com

Ingatkan Pemerintah,  
PKS: Sila Pertama,  
Semua Agama  
Larang Miras

SINDOnews.com

Setuju Saham Bir  
Dicabut, PKS: Miras  
Sumber Kejahatan

ANTARA

Rakernas PKS 2021 tegaskan sikap jadi oposisi, tolak  
investasi miras

AKERNA

# Agar Tak Sekedar Wacana, HNW: Penting Presiden Jokowi Buat Perpres Baru Pencabutan Investasi Miras

## KUTIPAN

Jakarta (03/03) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi terhadap industri minuman keras (miras)/beralkohol,

dan mengingatkan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, dengan menghadirkan Perpres baru dan mempublikasikannya kepada publik.

"Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan pembatalan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya melalui

siaran pers di Jakarta, Rabu (03/03).

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa kehadiran dokumen hukum secara legal formal, berupa adanya Perpres yang baru, atau revisi Perpres yang telah mencabut lampiran yang ditolak oleh masyarakat luas itu, sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghentikan polemik dan ketidakpastian hukum yang masih dirasakan oleh banyak elemen bangsa. Ini dibutuhkan karena sering terjadinya pernyataan publik Presiden Jokowi justru diimplementasikan secara berbeda oleh para

pembantunya, dan tidak ada koreksi terhadap keganjilan seperti itu.

"Misalnya dalam kasus revisi UU ITE. Presiden Jokowi sudah menyatakan terbuka setuju dengan revisi UU tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda, dengan lebih hadirkan pedoman interpretasi UU ITE, bukannya merealisasikan harapan Presiden untuk terjadinya revisi, tapi malah semakin menimbulkan polemik di masyarakat. Jangan sampai, kasus pencabutan terkait Perpres investasi miras/beralkohol akan mengulang tragedi revisi UU ITE. Ketidaksamaan antara pernyataan dengan tindakan di lapangan," tukasnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa kehadiran dokumen/produk hukum atau Perpres baru yang mencabut isi lampiran investasi miras itu, mutlak diperlukan untuk melihat bahwa pernyataan tersebut bukan hanya sekedar basa basi politik, yang akan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**  
Wakil Ketua MPR RI

"Sangat penting Presiden segera buktikan penerimaannya. Dan kepada semua pihak agar tidak terlena, melainkan mengawasi dan memastikan agar komitmen Pak Jokowi yang diapresiasi oleh ormas-ormas dan masyarakat luas itu, betul-betul segera mewujudkan menjadi dokumen hukum yang resmi atau perpres yang baru"

makin menimbulkan kegaduhan publik, dan kekecewaan dari berbagai pihak yang telah sampaikan penolakan terhadap perpres investasi miras/beralkohol, padahal beliau-beliau yang sangat terhormat itu telah disebutkan

langsung oleh Presiden Jokowi seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Para Ulama dan Tokoh/Pimpinan di Daerah, termasuk suara dari Papua.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Fraksi PKS Apresiasi Pembatalan Aturan Legalisasi Industri Miras

## KUTIPAN

Legalisasi industri miras dengan memasukkannya sebagai daftar investasi positif jelas menimbulkan madhorot bagi masa depan bangsa. Menyadari hal itu, Fraksi PKS bersama sejumlah Fraksi di DPR mengusulkan RUU Larangan Meinuman Beralkohol dalam Prolegnas.

Jakarta (2/3) — Setelah mendapatkan penolakan yang luas dari berbagai pihak termasuk Fraksi PKS DPR RI, Presiden akhirnya mencabut aturan baru legalisasi investasi miras skala industri hingga eceran dan kaki lima yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi langkah cepat Presiden tersebut dan berharap ke depan kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama dan masa depan generasi bangsa.

"Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan

pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi. Penolakan Fraksi PKS tempo hari juga dalam rangka mengingatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia," ungkap Jazuli.

Legalisasi industri miras dengan memasukkannya sebagai daftar investasi positif jelas menimbulkan madhorot bagi masa depan bangsa. Menyadari hal itu, Fraksi PKS bersama sejumlah Fraksi di DPR mengusulkan RUU Larangan Meinuman Beralkohol dalam Prolegnas.

"Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia

sehat fisik, pikiran, mental dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini berharap semoga pencabutan aturan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali membuka investasi dan industri miras karena kepentingan pragmatisme ekonomi. Pancasila dan konstitusi, lanjut Jazuli, harus selalu dijadikan pedoman dan panduan arah kebijakan pemerintah dan negara.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi. Penolakan Fraksi PKS tempo hari juga dalam rangka mengingatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia

# Soal Pencabutan Perpres Miras, Aleg PKS: Tak Layak Konsumsi, Merusak Kesehatan

## KUTIPAN

Padang (02/03) --- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto menegaskan, minuman keras (miras) masuk kategori pangan yang tidak aman dikonsumsi.

Karena itu ia mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang membuka pintu investasi untuk industri miras sampai eceran.

Menurutnya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 mendefinisikan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

"Miras tidak aman dikonsumsi karena membahayakan kesehatan manusia serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Sifat miras mengandung unsur merusak kesehatan dan moral masyarakat," tandas Hermanto.

Pasal 1 tersebut, lanjutnya, diperkuat oleh Pasal 59 yang menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui penyediaan Pangan yang

beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

"Undang-undang tersebut mengamanahkan Pemerintah untuk mengadakan Pangan yang aman. Tapi Presiden mengeluarkan Perpres yang melegalkan beredarnya pangan yang tidak aman," ungkap legislator dari FPKS DPR ini.

"Legalisasi investasi miras dengan Perpres jelas sangat bertentangan dengan amanat UU Pangan karena memberi peluang sebesar-besarnya kepada investor untuk memproduksi miras yang dapat berdampak pada keamanan pangan masyarakat dan bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat," papar legislator dari Dapil Sumbang I ini.

Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Padahal sebelumnya industri minuman keras termasuk daftar negatif investasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

“Legalisasi investasi miras dengan Perpres jelas sangat bertentangan dengan amanat UU Pangan karena memberi peluang sebesar-besarnya kepada investor untuk memproduksi miras yang dapat berdampak pada keamanan pangan masyarakat dan bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat,”

Jokowi Resmi Cabut Perpres  
Investasi Miras

## Aleg PKS: Apresiasi karena Mendengar Suara Publik

**KUTIPAN**

Jakarta (03/03) ---  
Presiden Joko  
Widodo (Jokowi)  
secara resmi telah  
mencabut peraturan  
presiden (perpres)

terkait pembukaan investasi  
dalam industri minuman keras  
(miras) yang mengandung  
alkohol, Selasa (2/3/2021).

Keputusan Jokowi ini  
lantas mendapat banyak  
apresiasi dari sejumlah partai,  
salah satunya Partai Keadilan  
Sejahtera (PKS).

Ketua DPP PKS Mardani  
Ali Sera menyatakan apresiasi  
pada keputusan Jokowi ini.  
Lewat akun Twitter-nya,  
@MardaniAliSera, kata Mardani,  
langkah yang diambil Jokowi  
membuktikan, Presiden  
mendengar aspirasi publik.

"Apresiasi karena  
mendengar suara publik.  
Jadi kan pelajaran bahwa

membangun bangsa mesti  
memegang prinsip," tulis  
Mardani, Selasa (2/3/2021).

Ia juga menyinggung  
statement Jokowi yang akan  
memprioritaskan pembangunan  
Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Mardani, penca-  
butan Perpres itu menyelamatkan  
SDM. "Pak Jokowi sendiri  
yang menegaskan arah  
pembangunan SDM sebagai  
prioritas utama."

"Pencabutan Perpres itu  
justru menyelamatkan program  
prioritas Pak Jokowi," lanjut  
tulisnya.

Anggota Komisi II DPR RI  
itu mengatakan akan bagus jika  
Jokowi bisa menelusuri  
bagaimana Perpres itu bisa  
memuat izin investasi miras.

Lebih lanjut, Mardani  
menyebut, adanya Perpres itu  
sama saja memalukan Jokowi  
sebagai Presiden.

"Bagus jika Pak Jokowi  
mencoba menelusuri bagaimana  
Perpres itu bisa memuat izin  
investasi Miras."

"Ini memalukan Pak Jokowi  
sendiri, jangan sampai terulang  
lagi," kata Mardani.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI



Apresiasi karena mendengar suara publik. Jadikan pelajaran bahwa membangun bangsa mesti memegang prinsip. "Pak @jokowi sendiri yang menegaskan arah pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Pencabutan Perpres itu justru menyelamatkan program prioritas Pak Jokowi

# Meski Sudah Dicabut, Aleg PKS Minta Pemerintah Hapus Miras dari Daftar Positif Investasi

## KUTIPAN

Tasikmalaya (03/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengingatkan kepada para Menteri dan pejabat di bidang ekonomi untuk melupakan membuka peluang investasi baru dari minuman keras (miras)/minuman beralkohol paska dicabutnya dari lampiran Perpres No. 10/2021.

"Dari sudut manapun, baik sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, bahkan agama, investasi miras tidak ada untungnya. Sebaliknya akibat konsumsi miras potensi kerusakan sosial dan budaya sebuah negara sangat besar", tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa Timor Leste saja yang mengkonsumsi miras sudah 2,1 liter per kapita per tahun sudah mulai berusaha untuk menguranginya. Pengurangan ini dikarenakan mereka sudah melihat dampak sosial, kesehatan, dan sebagainya.

"Per 2016 konsumsi miras di Indonesia sekitar 0,8 liter per kapita per tahun. Angka sebesar itu saja sudah berkontribusi terhadap 58% angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketika Peluang investasi miras dibuka lebar maka dipastikan akan mendorong peningkatan konsumsi miras di Indonesia", ungkap Toriq.

Toriq menilai, jika konsumsi miras tinggi maka bisa dibayangkan, akan sangat banyak persoalan sosial dan kesehatan sekaligus peningkatan angka kriminalitas

yang akan membuat beban Indonesia semakin besar.

Selanjutnya, Toriq menyambut baik keputusan Presiden yang mencabut sejumlah butir di Lampiran Perpres 10 tahun 2021 terkait dengan investasi miras (2/3). Apresiasi juga disampaikan oleh Toriq atas upaya tak kenal lelah umat Islam, para tokoh ormas islam dan pihak-pihak lainnya yang menolak investasi miras di Indonesia.

"PR selanjutnya, untuk Bapak Presiden paska pencabutan sejumlah butir di Lampiran Perpres 10 tahun 2021 terkait dengan investasi miras adalah mencabut miras dari Daftar Positif Investasi (DPI)", tegasnya.

Menurut Toriq, berdasar UU Cipta Kerja, miras tidak inventasi (DNI) yakni daftar sektor bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Jika tidak ingin kontroversi investasi miras ini terulang lagi, Pemerintah harus segera memasukkan miras ke DNI.



## **KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

"Sangat penting Presiden segera buktikan penerimaannya. Dan kepada semua pihak agar tidak terlena, melainkan mengawasi dan memastikan agar komitmen Pak Jokowi yang diapresiasi oleh ormas-ormas dan masyarakat luas itu, betul-betul segera mewujudkan menjadi dokumen hukum yang resmi atau perpres yang baru"

# Pemerintah Cabut Investasi Miras, Aleg PKS: Sikap yang Harus Diambil, Jika Ingin Rakyat Sehat

## KUTIPAN

Jakarta (03/03) --- Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya ramai menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, menanggapi hal tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil Pemerintah mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat, katanya dalam keterangan media Selasa, (02/03/2021).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, laporan WHO menyebutkan, 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama tahun 2016, angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi

alkohol.

Oleh karena itu, kata Netty, Jika ingin rakyat sehat, aturan tersebut memang harus dicabut.

"Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal. Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat

umat Islam yang mayoritas di negeri ini," katanya.

Menurut Netty, aturan tersebut tidak layak diberlakukan karena bertentangan juga dengan kampanye gerakan masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes RI.

"Rilis Kemenkes menyebutkan sepuluh dampak negatif dari minuman beralkohol bagi kesehatan. Artinya rakyat diminta untuk menghindari miras. Jadi aneh kan jika malah diletakkan dan didorong investasi industrinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.

Terakhir Netty meminta Pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan agar tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan publik.

"Apa sih susahnyanya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, test the water, apalagi tidak menelaah



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal.

dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah," tandasnya

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31,

32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Peraturan ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SIKAP TEGAS PKS

# BATALKAN PERPRES LEGALISASI MIRAS!

99 KUTIPAN

Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi. Kami mengingatkan agar jangan sampai kebijakan negara kehilangan arah

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



# Aleg PKS: Pelonggaran Izin Industri Miras **Bahayakan** Generasi Muda Bangsa

## KUTIPAN

Surabaya (28/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI yang juga membidangi investasi, Amin Ak menolak keras pelonggaran izin investasi industri minuman keras (Miras),

seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Menurut Amin, berkembangnya industri Miras hingga ke daerah-daerah, baik industri kecil maupun besar menjadi ancaman bagi bangsa, terutama generasi masa depan.

"Ini apa-apaan? kita memang butuh investasi, tapi jangan asal investasi sehingga membahayakan masa depan bangsa ini," tegas Amin.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu pun mengungkapkan sejumlah fakta yang menyebutkan bahayanya alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun kesehatan manusia.

Amin mengatakan, palup tidak 58 persen kriminalitas di Indonesia disebabkan konsumsi minuman keras.

"Selain itu, merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat, lebih dari 3,5 juta kematian pada 2018 akibat minuman beralkohol. Sedangkan data Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) mengungkapkan, ada 14,4 juta anak muda Indonesia dari sekitar 63 juta anak muda mengonsumsi minuman beralkohol," papar Amin

Studi Genam juga, katanya mengungkapkan remaja lebih cenderung gampang membunuh maupun melakukan aksi kriminalitas lainnya karena pengaruh minuman beralkohol.

"Mabes Polri mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 225 kasus tindak pidana yang terjadi karena dipicu minuman beralkohol yang dikonsumsi pelaku di Indonesia. Di Sulawesi Utara, Polri menyebutkan 70% kriminalitas dipengaruhi oleh Miras," urainya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjutnya, merujuk hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, umur mulai minum alkohol pada usia 15-19 tahun pada pria sebesar 70 persen dan wanita 58 persen.

"WHO juga menyebutkan, penggunaan alkohol merupakan faktor penyebab di lebih dari 200 penyakit dan kondisi cedera. Selain itu, konsumsi alkohol menyebabkan kematian dan kecacatan prematur, dimana pada kelompok usia 20-39 tahun sekitar 13,5% dari total kematian disebabkan oleh alkohol. Alkohol juga menyebabkan berbagai gangguan mental dan perilaku serta cedera," terang Amin.

Hubungan kausal terbaru, imbuh Amin, telah terjalin antara minuman yang berbahaya dan kejadian penyakit menular seperti tuberkulosis serta perjalanan HIV / AIDS. Di luar konsekuensi kesehatan, penggunaan alkohol yang berbahaya membawa kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi individu dan masyarakat luas.

"Ini logika yang sangat fatal, memafaatkan kemudahan



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

**"Kami tidak anti investasi tapi jangan hanya memikirkan ekonomi saja dengan mengijinkan investasi yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya"**

an investasi dalam UU Cipta Kerja dengan melonggarkan industri miras hingga ke daerah. Tidak dilonggarkan saja, pemerintah tidak mampu kok mengontrol peredaran miras, apalagi jika industrinya makin marak?" tanya Amin gusar.

Amin pun mendesak agar Jokowi mencoret kemudahan ijin investasi Miras dalam Perpres No. 10/2021 tersebut. Amin juga mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencoret Industri Miras

dari Daftar Investasi Positif yang dikeluarkannya.

Amin pun meminta Presiden jangan hanya memikirkan faktor ekonomi, namun abai dengan keselamatan masa depan bangsa ini.

"Kami tidak anti investasi tapi jangan hanya memikirkan ekonomi saja dengan mengijinkan investasi yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya," kata Amin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Tolak Dibukanya Investasi Miras, Politisi PKS: **Membahayakan** Masa Depan Generasi Bangsa

## KUTIPAN

Muzzammil turut menegaskan bahwa Papua sebagai salah satu daerah yang dicanangkan sebagai daerah penanaman modal industri miras, menyatakan menolak eksistensi daerahnya sebagai wilayah Industri tersebut.

Jakarta (27/02) — Anggota Badan Legislatif (Baleg) dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf mendesak Pemerintah untuk segera mencabut ketentuan industri Miras yang terdapat dalam Perpres No.10 tahun 2021.

Muzzammil berpendapat bahwa perpres tersebut dapat membuka pintu untuk industri Miras yang akan membahayakan kesehatan dan moral generasi bangsa.

"Padahal menyelamatkan moral bangsa adalah kewajiban negara, untuk itu negara tidak boleh menjerumuskan warganya ke kondisi bahaya melalui Legalisasi Industri Miras & Eceran. Kondisi ini bila terus dibiarkan akan berbahaya, &

dapat mengubah wajah Indonesia yang pancasilais (agamis) ke Liberal," ungkap Muzzammil.

Muzzammil mengatakan bahwa selama ini Anggota DPR telah berupaya menghadirkan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), namun belum membuahkan hasil meskipun telah memasuki tahap harmonisasi.

Muzzammil turut menegaskan bahwa Papua sebagai salah satu daerah yang dicanangkan sebagai daerah penanaman modal industri miras, menyatakan menolak eksistensi daerahnya sebagai wilayah Industri tersebut.

"Uniknya pernyataan itu disampaikannya setelah

Perpres tersebut lahir, dengan kata lain Perpres tersebut justru terkesan dipaksakan dan tidak aspiratif. Seharusnya Perpres tersebut terlebih dahulu disusun melalui kajian antropologis dan sosiologis masyarakat setempat yang terdampak dari kebijakan yang diatur dalam Perpres," tegas Anggota Komisi I ini.

Sebelumnya, pada tahun 2013 dan 2016 Provinsi Papua telah menerbitkan Perda No. 15/2013 & Perda No. 22/2016 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan Minol.



**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Komisi I DPR RI

menyelamatkan moral bangsa adalah kewajiban negara, untuk itu negara tidak boleh menjerumuskan warganya ke kondisi bahaya melalui Legalisasi Industri Miras & Eceran. Kondisi ini bila terus dibiarkan akan berbahaya, & dapat mengubah wajah Indonesia yang pancasilais (agamis) ke Liberal

Polemik Perpres Investasi Miras,

# Anggota FPKS: Pemerintah lebih **Pentingkan** Pengusaha daripada Rakyat

**KUTIPAN**

Medan (27/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyangkan langkah Pemerintah yang membuka izin investasi untuk industri minuman keras (Miras) atau minuman beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat Indonesia.

"Pemerintah seperti kehilangan arah dalam setiap kebijakan yang diputuskan, Investasi ini sama saja Pemerintah telah membahayakan generasi bangsa berikutnya. Silahkan Buka Investasi yang memberi kemajuan bagi rakyat dan bangsa, bukan investasi yang malah menghancurkan rakyat dan bangsanya," ungkap Iskan.

Menurut Iskan, ini ancaman serius akan Rusaknya moral bangsa dan Gangguan Ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat nantinya.

"Berapa banyak Korban dan kejadian kriminal yang diakibatkan oleh Minuman beralkohol ini, padahal

organisasi kesehatan Dunia (WHO) mengatakan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan bahkan Pembunuhan. Dengan kemudian di Indonesia, Polri juga menyampaikan data 3 tahun terakhir, bahwa ada 223 kasus kriminal yang telah ditangani kepolisian diakibatkan Miras. Mulai dari kasus pemerkosaan, pencurian bahkan pembunuhan. Dengan kebijakan ini, Indonesia harus waspada. Karena miras ini sudah terbukti menyebabkan degradasi moral, perilaku kriminal, keresahan sosial, dan masalah kesehatan." Ujar iskan.

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan industri minuman

keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"saya melihat Pemerintah telah mengeksploitasi bangsa ini demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah lebih mementingkan Pengusaha daripada Rakyatnya sendiri. Harusnya Platform yang dibangun Pemerintah terkait dunia usaha adalah bagaimana seharusnya dapat menghasilkan Kebaikan yang sebesar-besarnya dan kesejahteraan bagi masyarakat luas," terangnya.

Lebih lanjut, Iskan melihat ketidakjelasan pemerintah dalam mengelola negara. Bangsa ini seperti kehilangan



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

**"Pemerintah seperti kehilangan arah dalam setiap kebijakan yang diputuskan, Investasi ini sama saja Pemerintah telah membahayakan generasi bangsa berikutnya"**

arah jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan.

"Kami Fraksi PKS dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengecam Keras agar Keppres no 10 tahun 2021 agar dibatalkan saja. Kita punya sejarah bahwa tahun 2013 Mahkamah Agung (MA) pernah membatalkan Keppres no 3 tahun 1997 tentang Minuman keras. Alasan mutlak yang disampaikan MA

pada waktu itu adalah fakta di lapangan Keppres itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Ada manusia yang Koor-koar kesana kemari tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi Jauh panggang dari api, dalam praktiknya, mereka masih mengedepankan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang jelas-jelas itu bukan karakter dan jati diri bangsa kita." Pungkasnya.

# Aleg PKS Kritisi Dibukanya Investasi Miras, yang **Sebabkan** Tingginya Angka Kriminalitas

## KUTIPAN

Tercatat sekitar 58% angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol. Pemerintah malah membuka peluang baru investasi industri minol di Indonesia

Tasikmalaya (26/02) — Anggota Legislative dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengungkapkan bahwa PKS tidak pernah bosan mengingatkan betapa bahayanya minuman beralkohol (Minol) kepada masyarakat Indonesia.

“Baru saja, seorang oknum aparat yang berada dalam pengaruh minol melakukan penembakan yang mengakibatkan 3 orang tewas di sebuah cafe, Cengkareng Barat (25/02). Hanya gara-gara tersangka diberikan tagihan atas minol yang dikonsumsinya”, ungkapnya.

Namun menurutnya sungguh mengherankan ketika secara statistik, Mabes Polri mengungkapkan telah terjadi sebanyak 223 kasus tindak

pidana yang dilatarbelakangi karena alkohol dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak tahun 2017.

kemudian, lanjutnya, tercatat sekitar 58% angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol. Pemerintah malah membuka peluang baru investasi industri minol di Indonesia.

“Apa yang dilakukan Pemerintah sangatlah mengejutkan. Karena Pemerintah menetapkan industri minuman beralkohol sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup”, ungkap Toriq Heran. Padahal tambah Toriq lagi,

Kami di DPR sedang membahas RUU minol, yang diharapkan menjadi payung hukum untuk mempertegas aturan minol lebih ketat, lebih jelas, lebih memiliki kepastian hukum mulai dari jenis, pembatasan, hingga sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran minuman beralkohol.

“Oleh Karenanya Pemerintah harus menunda pemberlakuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini dan menghapus aturan investasi industri minuman beralkohol dari lampiran III perpres 10/2021”, tegas Toriq.

la mengakui bahwa, Ini salah satu kekhawatiran PKS ketika Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu. Bahwa Pemerintah akan semuanya membuat aturan turunan yang menurut pemerintah baik untuk ekonomi namun belum tentu baik untuk sosiologi-budaya Indonesia.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Komisi I DPR RI

“Pemerintah harus menunda pemberlakuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini dan menghapus aturan investasi industri minuman beralkohol dari lampiran III perpres 10/2021. Ini salah satu kekhawatiran PKS ketika Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan beberapa waktu lalu. Bahwa Pemerintah akan semuanya membuat aturan turunan yang menurut pemerintah baik untuk ekonomi namun belum tentu baik untuk sosiologi-budaya Indonesia. ”



Sikap Tegas Fraksi PKS

# BATALKAN PERPRES LEGALISASI MIRAS!



Rakyat lagi susah akibat covid-19, hendaknya tidak ditambahi kekhawatiran soal miras.

## HIDAYAT NURWAHID

Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin Pemerintah khilaf, dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan.

## JAZULI JUWAINI

Kami tidak anti investasi tapi jangan hanya memikirkan ekonomi saja dengan mengijinkan investasi yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya

## AMIN AK

Sudah sejak periode lalu PKS memperjuangkan agar disahkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi UU. Karena merupakan amanah Pasal 28H ayat 1 UUD 1945

## MAHFUDZ ABDURRAHMAN

Menyelamatkan moral bangsa adalah kewajiban negara, untuk itu negara tidak boleh menjerumuskan warganya ke kondisi bahaya melalui Legalisasi Industri Miras & Eceran

## ALMUZZAMMIL YUSUF

Pemerintah seperti kehilangan arah dalam setiap kebijakan yang diputuskan, Investasi ini sama saja Pemerintah telah membahayakan generasi bangsa berikutnya

## ISKAN QOLBA LUBIS

Tercatat sekitar 58% angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Indonesia juga terjadi akibat pengaruh minuman beralkohol. Pemerintah malah membuka peluang baru investasi industri minol di Indonesia.

## TORIQ HIDAYAT

Seharusnya saat ini, Pemerintah dan DPR bersegera membahas dan mensahkan RUU Minol yang dampaknya akan sangat signifikan untuk menyelamatkan nyawa anak bangsa. Bukan malah, melegalkan Miras

## ANIS BYARWATI

Kebijakan Negara harus menutup semua potensi yang mengancam kehidupan rumah tangga keluarga Indonesia

## NEVI ZUAIRINA

# Polemik Dibukanya Investasi Industri Miras, Aleg PKS: RUU Larangan Minol Mendesak Dibahas!

## KUTIPAN

Jakarta (26/02) --- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menyoroti polemik dibukanya perizinan Investasi Industri Miras oleh Pemerintah.

Menurut Mahfudz, Perpres yang berawal dari UU Cipta Kerja tersebut bisa menimbulkan polemik di masyarakat jika RUU Larangan Minuman Beralkohol tak segera disahkan.

"UU Cipta Kerja berimplikasi pada peraturan perundang-dan di bawahnya. Jika Pemerintah tidak tepat dalam membuat aturan turunan dari UU Cipta Kerja, dapat menimbulkan terjadinya polemik di masyarakat. Salah satu potensi polemiknya adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021," ungkap Mahfudz.

Perpres tersebut, imbuhnya, dapat menjadi polemik karena Pemerintah membuka pintu investasi untuk industri minuman keras. Meskipun dalam lampiran III Perpres 10/2021 Pemerintah mengatur hanya tempat tertentu yang dapat dilakukan penanaman

modal bagi industri minuman keras dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal, harus ada UU yang memperkuat adanya aturan terkait dengan peredaran minuman keras.

"Oleh karenanya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sangat mendesak untuk dibahas!," jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) itu.

Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, tegas Mahfudz, sangat penting untuk mengatasi peredaran miras ilegal dan oplosan, khususnya bagi remaja, serta untuk pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol.

Seperti diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Sudah sejak periode lalu PKS memperjuangkan agar disahkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi UU. Karena bagi PKS pengaturan tentang minuman beralkohol merupakan amanah Pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya PKS mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama mewujudkan UU Larangan Minuman Beralkohol," tutup Mahfudz.

Sebelumnya, Pemerintah mulai menerbitkan Peraturan Beralkohol (Perpres) yang menjadi aturan turunan pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu Perpres yang sudah disahkan Presiden Jokowi adalah Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Di dalam Pasal 2 ayat (1)



**H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**  
Anggota Komisi VI DPR RI

Perpres tersebut dapat menjadi polemik karena Pemerintah membuka pintu investasi untuk industri minuman keras. Meskipun dalam lampiran III Perpres 10/2021 Pemerintah mengatur hanya tempat tertentu yang dapat dilakukan penanaman modal bagi industri minuman keras dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal, harus ada UU yang memperkuat adanya aturan terkait dengan peredaran minuman keras.

Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diatur mengenai bidang usaha yang dikecualikan dari bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, yang

meliputi bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, serta bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

# Mirisnya Dampak Sosial dan Keamanan, HNW: Presiden Harus Tarik Perpres Perizinan Investasi Miras

## KUTIPAN

Jakarta (26/02) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, sangat prihatin dan mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka keran investasi untuk industri minuman keras mengandung alkohol

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dibukanya investasi untuk Miras beralkohol ini tidak mempertimbangkan dengan serius bahaya dan dampak negatif miras yang sudah terjadi di masyarakat.

"Kemaren, aparat penegak hukum baru saja mengalami kejadian yang memilukan, dimana seorang oknum polisi yang mabuk karena ditagih pembayaran miras, malah menembaki 4 warga, 1 anggota TNI dan 2 pegawai café di Cengkareng, tewas. Ini salah satu bahaya yang nyata dari

miras, yang justru industrinya kini mau dibuka keran untuk investasi oleh Presiden. Sekalipun disebut beberapa daerahnya, tapi tak ada aturan yang melarang penyebaran konsumsi dengan segala dampak negatifnya" ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat(26/02).

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa pembukaan investasi untuk industri miras itu berpotensi membuat produksi miras semakin melimpah banyak dan peredarannya semakin masif di lapangan.

"Bila dibaca secara keseluruhan Lampiran III Perpres yang menjadi dasar, maka ketentuan soal izin investasi ini

tidak juga diberlakukan di banyak daerah, apalagi tidak ada limitasi berapa investasi untuk asing dan dalam negeri, jadi sangat terbuka bebas. Ini bisa berbahaya sekali. Kemaren dengan segala pembatasannya saja, tragedi terkait miras sudah bikin miris, apalagi bila dibuka longgar-longgar seperti ini," ujarnya.

Dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021, memang disebutkan bahwa investasi miras mengandung alkohol dan investasi minuman alkohol berupa anggur dapat dilakukan di berbagai daerah, seperti Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Namun, bila dibaca secara menyeluruh, terutama poin b, Perpres tersebut juga membolehkan di daerah lain berdasarkan ketetapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan usulan gubernur daerah yang bersangkutan.

"Jadi bila kita baca seksama, pembukaan investasi untuk industri miras ini bisa dilakukan di banyak daerah di Indonesia,



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Bila dibaca secara keseluruhan Lampiran III Perpres yang menjadi dasar, maka ketentuan soal izin investasi ini bisa juga diberlakukan di banyak daerah, apalagi tidak ada limitasi berapa investasi untuk asing dan dalam negeri, jadi sangat terbuka bebas. Ini bisa berbahaya sekali

bukan hanya daerah-daerah yang definitif disebutkan itu. Ini aturan yang tricky juga," ujarnya.

HNW menilai Presiden Jokowi hanya untuk kepentingan investasi dan ekonomi telah mengabaikan realita bahaya sosial dan keamanan terkait miras serta banyaknya korban-korban yang berjatuh, serta

keresahan Rakyat dan Pemerintah Daerah terkait bahaya miras ini. Sebagai contoh, beberapa provinsi yang disebutkan secara spesifik dalam Perpres sebagai diperbolehkan untuk investasinya miras, malah mengalami masalah terhadap peredaran miras.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Legislator PKS: Perpres No.10 Tahun 2021 Bentuk Arogansi Pemerintah Pusat

## KUTIPAN

Jakarta (02/03) --- Anggota DPR Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat, mengaku heran dengan Perpres No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang dikeluarkan presiden Jokowi, karena di dalamnya menjadikan minuman beralkohol sebagai bidang usaha terbuka.

Menurut Surahman, yang lebih mengherankan disebutkan penanaman modal atas industri mengandung alkohol dan anggur dapat dilakukan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, serta berdasarkan usulan gubernur.

"Ada empat provinsi yang dapat dilakukan penanaman modal yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua," tambahnya.

Surahman Hidayat mempertanyakan apakah benar bahwa minuman beralkohol merupakan budaya dan kearifan lokal. Apakah minuman beralkohol merupakan budaya dan kearifan lokal dari 4

provinsi tersebut.

"Saya ragu apakah benar minum minuman beralkohol atau anggur merupakan budaya dan kearifan lokal dari 4 provinsi tersebut," ujar Surahman.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mempertanyakan, apakah Perpres ini khususnya terkait dengan poin penanaman modal industri minuman beralkohol atau anggur merupakan usulan Gubernur? Tercantumnya 4 (empat) provinsi dalam lampiran Perpres tersebut seharusnya merupakan usulan Gubernur.

"Tapi apakah benar

Gubernur Papua mengusulkan sebagai provinsi yang terbuka dalam penanaman modal industri minuman beralkohol? Saya kok tidak yakin, karena kita ketahui bersama masih berlakunya Perda Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 tentang pelarangan peredaran, produksi, dan penjualan minuman beralkohol di Papua. Munculnya perda tersebut dikarenakan alkohol berimplikasi buruk terhadap aktivitas masyarakat Papua," tegas Surahman.

Dengan kondisi seperti ini, kata Surahman, memperlihatkan sebenarnya Perpres No. 10 Tahun 2021 tidak konsisten sejak awal.

"Saya menilai Perpres No.10 Tahun 2021 hanya wujud kepentingan ekonomi pemerintah pusat tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah," tutur Anggota DPR RI dari Jabar X ini.



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Komisi II DPR RI

“Apakah benar bahwa minuman beralkohol merupakan budaya dan kearifan lokal. Apakah minuman beralkohol merupakan budaya dan kearifan lokal dari 4 provinsi tersebut. Saya ragu apakah benar minum minuman beralkohol atau anggur merupakan budaya dan kearifan lokal dari 4 provinsi tersebut”

# Desak Batalkan Perpres Investasi Miras, Aleg PKS: Jangan Buka Ruang Rusaknya Anak Bangsa!

## KUTIPAN

Jakarta (02/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, angkat bicara terkait perpres yang membuka legalisasi investasi untuk miras.

"Kita minta Presiden Jokowi untuk mencabut perpres tersebut, tolong jangan buka ruang kerusakan masa depan anak bangsa," tegas Nurhasan Zaidi.

Nurhasan mengatakan bahwa Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut terlalu gegabah khususnya mengenai pembukaan keran investasi miras di daerah-daerah tertentu. Baginya tidak ada alasan yang logis dan mendesak membuka keran investasi di bidang miras.

"Selama ini kita sepakat bahwa miras sering jadi penyebab keributan dan konflik, itu sebabnya aturan tentang miras kita perketat. Nah, kalau ini di legalisasi investasi dan distribusinya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap

dampak kedepannya, ngaco ini", ujarnya.

Anggota Komisi VIII DPR yang membidang keagamaan, sosial, perlindungan anak dan perempuan ini juga menyoroti dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dengan kebijakan tersebut mengingat tanpa legalisasi miras pun angka kenakalan remaja masih cukup tinggi di Indonesia.

"Semua agama di Indonesia berpandangan yang sama terhadap bahaya miras hingga melarangnya, ini amanah Tuhan dan kalau ini dilanjutkan jelas sekali melanggar pengalaman Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Beradab. Bagaimana bisa beradab kalau anak-anak bangsanya dibiarkan rusak dengan kebijakan ini,"

tegasnya.

Terkait dengan kekhususan daerah tertentu yang diperbolehkan dalam Perpres tersebut, Nurhasan mengatakan bahwa boleh jadi perpres tersebut disalah artikan dilapangan dan berpeluang merembet ke daerah daerah lain, apalagi dibuka ruang investasi dari luar negeri yang mengganggu, bisnis miras yang adiktif.

"Sudahlah, pemerintah jangan buat kebijakan kontroversial lagi. Bila ingin membangun investasi, Inshaallah masih banyak ruang dan peluang yang bisa kita gali dan manfaatkan. Jangan hanya karena alasan investasi dan bangkitnya ekonomi, kita gegabah terhadap masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, kita minta presiden mencabut Perpres ini, terlalu mahal harga pengorbanannya!", pungkasnya.



**H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IX

"Sudahlah, pemerintah jangan buat kebijakan kontroversial lagi. Bila ingin membangun investasi, Inshaallah masih banyak ruang dan peluang yang bisa kita gali dan manfaatkan. Jangan hanya karena alasan investasi dan bangkitnya ekonomi, kita gegabah terhadap masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, kita minta presiden mencabut Perpres ini, terlalu mahal harga pengorbanannya!"



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

## Tanggapi Wacana Revisi UU ITE

# Aleg PKS: Benahi Sisi Pelaksana dan Pasal Karet

### KUTIPAN

Jakarta (26/02) --- Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menanggapi wacana revisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menjelaskan, keberadaan UU ITE sebelum tahun 2008 sangat diperlukan sebab jagat digital di Indonesia saat itu seperti hutan belantara yang kerap terjadi kasus penipuan, pornografi, pembajakan kartu kredit, eksploitasi anak, dan bahkan salah satu situs perjudian online terbesar berasal dari Indonesia.

"Akhirnya dibuatlah oleh pemerintah. Mestinya ada dua UU, UU transaksi elektronik dan UU terkait informatika, tetapi kemudian untuk efisiensi digabungkan menjadi satu. Waktu itu para perumus UU ini berpikirnya jangan sampai ada hal-hal yang dilarang itu lolos dikerjakan orang di dunia

digital, maka muncullah pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya sampai 45," ujarnya dalam acara PKS Legislative Corner, Jum'at (26/02).

Legislator asal Dapil DI Yogyakarta tersebut membeberkan, dalam perjalanannya setelah UU ITE disahkan tahun 2008 banyak terjadi kasus yang justru menonjol terkait dengan hal-hal yang dilarang seperti pencemaran nama baik, kesulitaan, ancaman kekerasan, ujaran kebencian berbasis SARA, dan seterusnya. Sehingga menimbulkan reaksi yang keras, dan kemudian Pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan revisi.

"Saya masuk Panja (Panitia Kerja) Anggota revisi ini.

Beberapa pasal yang sering digunakan mengkriminalkan orang direvisi, antara lain di Pasal 27 Ayat 1, 2, 3, 4, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 44, Pasal 45. Ada beberapa tema yang dimasukkan, salah satunya tema right to be forgotten, saya salah satu pengusulnya waktu itu, intinya terkait dengan orang yang dicemarkan nama baiknya atau dituduh melalui media digital, yang kedua soal perbuatan yang dilarang, tema yang ketiga intersepsi/penyadapan, yang keempat pemutusan akses/pemblokiran, dan yang kelima penyidik dalam hal ini memperjelas wewenang penyidik PNS," sambungnya.

Doktor Teknik Kimia itu menerangkan, UU ITE tidak membuat norma baru, yang ada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dipindahkan ke UU ITE, jika masalah di dalam KUHP ada pembedaan derajat yang dilarang tetapi di UU ITE tidak. Lebih lanjut, Fraksi PKS dalam hal ini diwakili oleh Sukamta berharap pembenahan UU ITE melalui revisi dari sisi pelaksanaan dan koreksi dalam bunyi dari Pasal 27, 28, 29, 36, dan 45.

"Supaya redaksionalnya itu tidak memungkinkan untuk ditarik-ditarik secara multitafsir, jangan sampai nanti ada satu perbuatan dinyatakan melanggar UU ini, untuk perbuatan yang sama dinyatakan tidak melanggar. Kemudian perbuatan yang sama-sama melanggar ada



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

**"Supaya redaksionalnya itu tidak memungkinkan untuk ditarik-ditarik secara multitafsir, jangan sampai nanti ada satu perbuatan dinyatakan melanggar UU ini, untuk perbuatan yang sama dinyatakan tidak melanggar. Kemudian perbuatan yang sama-sama melanggar ada yang diproses, ada yang tidak diproses**

yang diproses, ada yang tidak diproses. Atau perbuatan yang sama-sama diproses, satu dituntut dengan berat sekali kemudian dipenjarakan sebelum diproses, yang satu lagi

diproses tapi dengan sangat ringan sekali. Intinya bagaimana menjadikan pasal karet menjadi tidak karet lagi," imbuhnya.  
Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Prajurit Dan Staff TNI AD yang Wafat Akibat Sakit Meningkat, Aleg PKS: **Harus segera Evaluasi**

## KUTIPAN

Toriq menilai, TNI harus melakukan evaluasi, sejauh mana implementasi program menjaga kesehatan prajurit TNI telah dilaksanakan, sebagaimana amanat UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Tasikmalaya (25/02) — Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD) pada Rapim TNI AD TA 2021, Rabu (24/2), mengungkapkan bahwa jumlah kematian prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD yang diakibatkan karena sakit terus meningkat.

Senada dengan pernyataan Kasad, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengungkapkan bahwa Prajurit dan PNS TNI AD yang wafat akibat sakit kian meningkat.

"Pada 2019, tercatat sebanyak 385 orang dan tahun berikutnya menjadi 714 orang, meningkat hampir dua kali

lipat," ungkapnya.

Politisi PKS ini menyampaikan rasa prihatin atas wafatnya para prajurit dan PNS yang diakibatkan karena akibat sakit tersebut.

Toriq menilai, TNI harus melakukan evaluasi, sejauh mana implementasi program menjaga kesehatan prajurit TNI telah dilaksanakan, sebagaimana amanat UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

"TNI harus mendorong agar para prajurit dan staff-nya kembali dan terus menerapkan pola hidup sehat. Sebelumnya mereka lulus menjadi prajurit karena memiliki fisik yang bugar

dan sehat. Jangan sampai setelah mereka berada dalam kesatuan malah tidak menjaga kesehatannya", ujar Toriq.

Menurutnya, ia sangat setuju dengan arahan KASAD bahwa dalam menjaga kebugaran dan kesehatan, para prajurit, terutama para komandan Korem dan Kodim harus memiliki tekad yang keras dan lebih scientific. Kuncinya adalah bagaimana menjaga pola makan.

"Kemudian yang tidak kalah penting, yakni kegiatan pemeriksaan kesehatan prajurit secara rutin harus dilakukan. Sarana dan prasarana Pelayanan kesehatan khusus prajurit harus terus dikembangkan. Dengan demikian semoga Jumlah kematian yang diakibatkan karena sakit dapat diminimalisir", harap Toriq.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

"TNI harus mendorong agar para prajurit dan staff-nya kembali dan terus menerapkan pola hidup sehat. Sebelumnya mereka lulus menjadi prajurit karena memiliki fisik yang bugar dan sehat. Jangan sampai setelah mereka berada dalam kesatuan malah tidak menjaga kesehatannya"

# Anggota FPKS Tegaskan UU Pemilu Perlu Direvisi

## KUTIPAN

Jakarta (23/02) --- Anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mengkritik pendapat yang menyatakan PJ dan kepala daerah definitif memiliki kewenangan yang sama.

"PJ yang akan ditunjuk apabila pilkada tetap dilaksanakan serentak 2024 memiliki kewenangan dan legitimasi yang berbeda dengan kepala daerah definitif," ujar Surahman.

Surahman Hidayat menyampaikan bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang atau UU tentang pilkada pada Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) memang mengatur tentang kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun 2022 dan 2023 dengan PJ.

"Dalam Pasal 201 UU Pilkada memang mengatur tentang kekosongan kepala daerah pada yang masa jabatannya habis tahun 2022

dan 2023 dengan PJ, yakni pada ayat (9) terkait kekosongan gubernur, ayat (10) terkait kekosongan walikota, dan ayat (11) terkait kekosongan bupati. Namun, perlu di ingat bahwa Pejabat Gubernur, Walikota, dan Bupati definitif berbeda dengan pejabat yang ditugaskan secara administratif negara mengisi kekosongan," tegas Surahman.

Surahman Hidayat juga mengingatkan bahwa PJ merupakan jabatan administrasi negara bukan jabatan politik hasil dari pemilihan, jadi legitimasinya lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah definitif.

"PJ itu jabatan administrasi bukan hasil pemilihan, jadi legitimasi nya lebih rendah dibandingkan dengan kepala

daerah definitif. Maka, revisi UU Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah keniscayaan, dimana saat ini kita butuh pemerintahan daerah yang efektif dalam menghadapi dampak Covid 19," ujar Surahman.

Menurut Surahman Hidayat, pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan berbarengan dengan pilg dan pilpres pada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam UU pemilu merupakan kesalahan produk legislatif, sehingga perlu direvisi. Tapi yang harus dipahami bahwa keputusan DPR dan pemerintah saat itu, dikarenakan persepsi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak, berbeda dengan saat ini dimana MK memberikan 6 alternatif pemilu serentak, dimana tidak ada kewajiban pilkada dilakukan bersamaan waktunya.

"Saat ini MK memberikan 6 alternatif pemilu serentak, dimana tidak ada kewajiban pilkada dilakukan bersamaan waktunya. Menurut MK pemilu serentak hanya mengikat untuk pilpres, pemilihan anggota DPR RI, dan pemilihan anggota DPD RI. Jadi sudah selayaknya UU pemilu direvisi sesuai dengan putusan MK dan pengalaman pemilu serentak 2019," kata



**Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**  
Anggota Komisi II DPR RI

PJ itu jabatan administrasi bukan hasil pemilihan, jadi legitimasi nya lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Maka, revisi UU Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah keniscayaan, dimana saat ini kita butuh pemerintahan daerah yang efektif dalam menghadapi dampak Covid 19

Surahman.

Anggota fraksi PKS DPR RI ini heran dengan sikap presiden dan partai politik yang menolakan revisi UU pemilu dikarenakan UU tersebut belum diterapkan.

"Seharusnya kita belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019. Pelaksanaan pemilu serentak 2019, begitu berat bagi penyelenggara pemilu, raturan petugas meninggal

dunia akibat kelelahan, masa iya kita baru merevisi UU pemilu setelah kejadian tersebut terulang kembali. Aneh kalau semua hal yang kita tahu akan berakibat buruk harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman dan melakukan perbaikan," tegas Surahman.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pelantikan Kepala Daerah,

# Aleg PKS: Masyarakat ingin perbaikan positif dapat diwujudkan, bukan keriuhan yang tak perlu

## KUTIPAN

Anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera memberikan beberapa pesan kepada Kepala Daerah yang telah dilantik, Jum'at (26/02).

Mardani menegaskan pentingnya bagi Kepala daerah hasil Pemilu 2020 untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai teladan yang baik.

"Junjung Integritas dan etika setinggi-tingginya. Taati ketentuan hukum yang membatasi kekuasaan & menjadi pedoman Pemda dalam menciptakan produk kebijakan demi kebaikan seluruh masyarakat. Masyarakat ingin perbaikan-perbaikan positif dapat segera diwujudkan, bukan keriuhan yang tak perlu." Tegas Mardani melalui akun pribadi Twitter-nya.

Mardani juga mengingatkan Kepala daerah untuk selalu berpegang teguh

pada transparansi dalam menjalankan tugasnya.

"Jauhi perilaku KKN karena jelas berdampak buruk bagi pembangunan daerah. Hati-hati terhadap para pencari rente di tubuh pemerintahan & bahkan lingkaran terdekat karena kerap menjadi celah terjadinya korupsi." Ungkap Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Mardani juga menekankan bahwa momentum 100 hari pertama berkerja harus dimaksimalkan dalam melaksanakan visi-misi dan menunjukkan perubahan demi memunculkan optimisme masyarakat.

Selain itu, Mardani juga mengingatkan pentingnya

pelayanan publik modern melalui sistem layanan dan aparatur yang berorientasi melayani.

"COVID-19 mestinya dapat dijadikan momentum negara hadir dan melayani. Berikan masyarakat solusi taktis terhadap banyak soal." Ungkap Mardani.

Mardani menyinggung hasil survei oleh Lembaga Survei Indonesia yang patut diberi perhatian.

"Tingkat kepercayaan Gubernur sedikit lebih tinggi dibanding presiden, juga terhadap wali kota. Gubernur (sangat percaya 14%, Cukup percaya 77%), walikota (Sangat percaya 14%, Cukup percaya 76%). Temuan ini bisa jadi momentum untuk makin dekat ke masyarakat karena terbukti mendapat sentimen positif yg lebih besar. Sekaligus tantangan untuk menunjukkan kinerja "konkret" karena masyarakat akan mengevaluasi secara lebih dekat bagaimana kemampuan ybs." Tutup Mardani.



**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

"Junjung Integritas dan etika setinggi-tingginya. Taati ketentuan hukum yang membatasi kekuasaan & menjadi pedoman Pemda dalam menciptakan produk kebijakan demi kebaikan seluruh masyarakat. Masyarakat ingin perbaikan-perbaikan positif dapat segera diwujudkan, bukan keriuhan yang tak perlu"

# Ke Kapolda Metro Jaya, DPR Bertanya Soal Oknum 'Polisi Nakal'

## KUTIPAN

Jakarta (19/02) — Hari kedua kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta, bertemu dengan Polda Metro dan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta.

Saat melakukan pertemuan di Polda Metro, Jakarta, Jumat (19/2), Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menanyakan soal 'polisi nakal', serta prosedur penanganan perkara yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Apalagi, ungkap Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, pada tahun kemarin ada 45 personel Polda Metro yang diberhentikan dengan tidak hormat. Angka ini, menurut dia, naik 13% dari sebelumnya.

"Artinya jumlah oknum 'polisi nakal' di Jakarta bertambah tahun ini. Seharusnya Polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum nakal dalam menjalankan tugasnya. Perlu dilakukan

pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi," ujarnya.

Habib Aboebakar menyampaikan ini karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang menceritakan bahwa mereka sangat sulit mendapatkan akses untuk menemui atau memberikan pendampingan hukum, utamanya kalau kasus aksi demonstrasi.

Bahkan, keluhan serupa juga datang dari Organisasi Bantuan Hukum yang resmi terdaftar di Kemenkumham. Misalkan saja pada waktu mereka mendampingi peserta aksi Omnibus Law, Kanit Kamneg tidak memberikan akses pendampingan, padahal pendampingan hukum adalah hak asasi yang harus diberikan kepada semua orang.

Selain itu, masih dikatakan Sekjen DPP PKS itu, ada beberapa masukan terkait pendampingan tahanan untuk orang miskin, ada beberapa catatan untuk Polda dari para pengacara pro bono. Pertama, akses penyuluhan di rutan polda dan polres sangat tertutup, padahal; Undang-Undang (UU) Bantuan Hukum memberikan program ini, ini resmi program melalui Kemenkumham.

Kedua, Rumah Tahanan (Rutan) Polda dan Polres tidak tahu cara membuat surat keterangan miskin. Padahal rutan-rutan lain biasa memberikan surat tersebut sebagai syarat pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin.

"Catatan-catatan ini tolong dijadikan masukan untuk dilakukan pembenahan kedepan, karena meskipun Jakarta adalah Kota Metropolitan, tidak semua orang yang bermasalah merupakan orang yang memiliki kemampuan keuangan untuk didampingi pengacara, inilah fungsinya negara memberikan bantuan hukum melalui APBN," imbuhnya.

Selain itu, Habib Aboebakar menggaris bawahi terkait peredaran narkoba di Jakarta. Dirinya menyampaikan kepada Kepala BNP Jakarta bahwa saat ini diperkirakan pengguna Narkoba di Jakarta mencapai 260 ribu orang.

"Padahal ada visi 'Jakarta Zero Narkoba'. Untuk itu, perlu ada langkah ekstra oleh BNP



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Pada tahun kemarin ada 45 personel Polda Metro yang diberhentikan dengan tidak hormat. Angka ini, menurut dia, naik 13% dari sebelumnya. Artinya jumlah oknum 'polisi nakal' di Jakarta bertambah tahun ini. Seharusnya Polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum nakal dalam menjalankan tugasnya. Perlu dilakukan pembinaan mental dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi

DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta Zero Narkoba ini, perlu ada desain khusus oleh BNP Jakarta untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Jakarta. Kesempatan itu, Habib Aboebakar juga mencermati persoalan peredaran Narkoba ditengah pandemik virus corona

atau Covid-19. Palsanya, pada saat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) karena Covid-19, ternyata peredaran Narkoba tidak menurun, bahkan diberapada daerah cenderung meningkat. Selengkapny kunjungi fraksi.pks.id

# PKS Ingatkan Utang Indonesia Sudah Level Membahayakan

Menurut International Debts Statistics yang dirilis World Bank (2021). **Indonesia masuk ke dalam 10 negara** berpenghasilan menengah rendah dengan utang terbesar di dunia.



## UTANG INDONESIA

- Total Utang Luar Negeri 2018

**Rp. 5496** Triliun

Naik 1,6%

- Total Utang Luar Negeri 2019

**Rp. 5589** Triliun  
(US\$ 402 Miliar)

- Total Utang Jangka Pendek pada 2019

**Rp. 612** Triliun

- Total Bunga yang harus dibayarkan

**Rp. 167** Triliun  
pada 2019

- NB** : Total utang Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral dan swasta.



# Aleg PKS Minta Pemerintah Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat di Pelosok

## KUTIPAN

Menurut Akmal, kabar hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan. Bahkan Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan Ketahanan Makanan

Jakarta (22/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin mengatakan, Pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran.

Menurut Akmal, kabar hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan. Bahkan Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan Ketahanan Makanan.

"Ini sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020

dengan metode online karena kendala pandemi. Bahwa hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas. Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja", tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.

"Sehingga kita punya data sendiri yang akurat sebagai pembandingan yang pada saat ini Indonesia memiliki Prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global. Berdasarkan

Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," papar Akmal.

Meski kata Akmal, data ini masih diperdebatkan, dimana prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016, namun pembuktiannya sangat lemah.

"Negara kita harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa datang. Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia Internasional kita, Hukum Rimba Dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara", jelas Akmal.

Pemerintah, kata Akmal, perlu membuktikan secara akurat, dimana Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA)



**Dr. H. ANDI AKMAL  
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya. Sehingga kita punya data sendiri yang akurat sebagai pembandingan yang pada saat ini Indonesia memiliki Prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global

menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020.

"Akan tetapi lebih baik bahwa penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Peringati HPSN 2021, Aleg PKS Ingatkan Perlunya Bangun Kesadaran Kolektif Tangani Sampah

## KUTIPAN

Anggota DPR RI asal Dapil Sukabumi ini mengajak seluruh elemen mulai dari produsen hingga konsumen pada tingkat rumah tangga untuk dapat terlibat dalam penanganan sampah.

Sukabumi (20/02) — Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari, merupakan momentum untuk peduli terhadap segala persoalan sampah.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah nasional tahun 2020 mencapai 67, 8 ton.

Terkait dengan persoalan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengingatkan, untuk ada langkah extra ordinary dalam menangani masalah sampah.

"Bila sampah terus meningkat maka akan mencemari udara, air, dan juga tanah, sehingga sampah bukan hanya menjadi masalah lingku-

ngan, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat," ungkap Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Anggota DPR RI asal Dapil Sukabumi ini mengajak seluruh elemen mulai dari produsen hingga konsumen pada tingkat rumah tangga untuk dapat terlibat dalam penanganan sampah.

"Perlu adanya Gerakan kolektif seperti pengembangan Bank Sampah, serta pemilihan sampah, dan diet kantong plastik," pungkas Slamet.

Slamet pun optimis, bila terjadi Gerakan Bersama maka target pengurangan sampah hingga 30 % pada tahun 2029 yang ditetapkan pada peta jalan pengurangan sampah dapat terealisasi.

"Total sampah nasional yang dapat ditangani baru sekitar 34 juta ton, artinya baru separuh dari total timbunan sampah," ujarnya.

Oleh karenanya, Slamet yang duduk di Komisi IV dan bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini, meminta Pemerintah meningkatkan kapasitas pengelolaan.

"Pemerintah pusat dan daerah harus menambah kapasitas penanganan dan pengelolaan, baik dari sisi sumberdaya pengangkutan, maupun mesin pengelolaan pada Tempat Penampungan Akhir (TPA)," urai Slamet.

"Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2021 dan Kita berharap peringatan HPSN yang telah berjalan 15 tahun (sejak tahun 2016), tidak hanya seremonial saja," ucap Slamet mengakhiri.



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Perlu ada langkah extra ordinary dalam menangani masalah sampah. Bila sampah terus meningkat maka akan mencemari udara, air, dan juga tanah, sehingga sampah bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat

# Selamatkan Hutan Papua, Politisi PKS: **Tindak Tegas** Perusahaan Perusak Hutan

## KUTIPAN

Sumbawa (23/02) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyerukan semua pihak agar bersama-sama menyelamatkan hutan Papua dari kerusakan yang semakin parah.

Hal ini, menurut Johan, disebabkan negara kita sudah masuk kategori negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia.

Johan menyebut negara kita masuk daftar 10 negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi dunia dan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 84,6 ribu Ha atau sekitar 17,1%.

"Maka saya mendesak Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap semua perusahaan yang telah melakukan perusakan hutan di tanah Papua", ujar Johan.

Politisi PKS ini merinci sejak tahun 2001 sampai 2019 lalu telah terjadi kehancuran hutan Papua seluas 663.443 Ha untuk kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan sawit, tambang, hutan tanaman

industry maupun praktek pembalakan liar.

Hal ini menurut Johan, menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Papua dimana tingkat degradasi alam dan kerusakan lingkungan semakin meningkat.

"Demikian juga dengan banyaknya penebangan liar yang menasar Kawasan konservasi dan hutan lindung harus segera dicegah dan diambil Tindakan tegas demi menyelamatkan Hutan Papua yang kita cintai," seru Johan.

Secara khusus Johan mengingatkan agar ada Tindakan tegas extra ordinary terhadap semua pengusaha yang merusak hutan Papua.

"Siapun dia yang telah menghancurkan hutan dengan cara ilegal baik pengusaha asing maupun lokal untuk

mengeruk keuntungan maka harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Pemerintah dan aparat hukum harus mengusut tuntas semua pelaku perusakan hutan Papua," tegas Johan.

Legislator dari NTB ini melihat banyaknya pembalakan liar yang semakin marak dan merugikan masyarakat Papua yang tinggal dan menghuni hutan harus disikapi dengan serius.

"Sebab Pemerintah dianggap belum mampu melindungi hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua. Saya mengingatkan pemerintah agar berlaku adil kepada masyarakat adat Papua", tutur Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini merasa sangat prihatin dengan kerusakan hutan Papua.

"Perubahan hutan yang berakibat merusak hutan pada tahun 2019 lalu telah mencapai 38.355 Ha, dan setiap tahun setara luas 35.000 lapangan sepak bola atau 134 kali lapangan sepak bola dalam satu harinya", papar Johan.



Foto : Istimewa

## **H. JOHAN ROSIHAN, S.T** Anggota Komisi IV DPR RI

**"Siapun dia yang telah menghancurkan hutan dengan cara ilegal baik pengusaha asing maupun lokal untuk mengeruk keuntungan maka harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Papua."**

Selanjutnya Johan melihat bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan masa kini harus memperhatikan kompleksitas yang sangat tinggi di tingkat lokal, nasional maupun global.

"Maka pemerintah harus memahami kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan dan interaksinya dengan

lingkungan sosial dan masyarakat adat setempat. Khusus di Papua harus ada kebijakan dan proyeksi masa depan pengelolaan hutan yang lebih adil dan lestari dengan cara memperkuat peran Lembaga adat Papua dalam pengelolaan hutan Papua," demikian disampaikan Johan Rosihan.

# Aleg FPKS Minta Pengelola Jalan Tol **Segera Antisipasi Banjir** di Sejumlah Ruas

## KUTIPAN

Jakarta (20/02) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menanggapi banjir dan kemacetan di sejumlah ruas tol antara lain Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Tangerang, Tol JORR, Tol Jagorawi, dan Tol Dalam Kota Jakarta, Sabtu dinihari.

Padahal, menurut Suryadi, BMKG telah memperkirakan bahwa sejak tanggal 19 Februari 2021 pukul 07.00 hingga tanggal 20 Februari 2021 pukul 07.00 terlihat sejumlah wilayah Jabodetabek secara umum mengalami hujan lebat hingga ekstrim.

"Banjirnya beberapa ruas tol tersebut memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol terhadap kemungkinan curah hujan yang terjadi," ungkap pria yang akrab disapa SJP ini

SJP berpandangan, seharusnya pengelola jalan tol dapat memanfaatkan informasi BMKG tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian ini dengan melakukan pengamatan

secara kontinyu di titik yang rawan banjir.

"Pengamatan ini seharusnya dilakukan di lokasi-lokasi dengan ketinggian yang rendah seperti under pass dan juga lokasi yang berdekatan dengan sungai serta titik-titik lokasi yang berdekatan dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dalam pembangunan seperti proyek KCIC," terangnya.

Selain itu, imbuhnya, pengelola tol juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dan juga pihak lainnya misalnya pengelola KCIC untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi banjir di jalan tol.

"Misalnya dengan bersama-sama membersihkan dae-

rah aliran sungai di sekitar jalan tol dari timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran air," tuturnya.

Pemeriksaan saluran drainase, ungkapnya, di sepanjang tol dan persiapan pompa di lokasi yang berpotensi banjir juga harus dilakukan.

"Jika diperkirakan infrastruktur yang ada tidak mampu menahan curah hujan ekstrim, maka pengelola tol harus meningkatkan kualitas drainase dan meningkatkan kapasitas pompa," ujar Anggota DPR asal NTB ini.

Dengan adanya persiapan yang matang, kata SJP, Fraksinya berharap kejadian ini tidak terulang kembali, karena kemacetan yang timbul akibat banjir ini sangat merugikan pengguna jalan tol.

"Sedangkan pada ruas jalan tol yang mengalami banjir saat ini, FPKS berharap pengelola jalan tol dapat melakukan penanggulangan kemacetan secara cepat. Bila dimungkinkan, dapat memberlakukan kontra flow atau jika tidak memungkinkan maka sebaiknya pintu tol ditutup dan pengguna dapat keluar di pintu tol terdekat. Hal



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Banjirnya beberapa ruas tol tersebut memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol terhadap kemungkinan curah hujan yang terjadi,"

ini untuk mengantisipasi dampak kerugian yang lebih banyak akibat panjangnya kemacetan yang terjadi," papar Suryadi.

Selain itu, tambahna, perlu juga dipersiapkan jalur rescue jika terjadi hal-hal darurat seperti pertolongan bagi orang yang sakit dan

sebagainya.

"Untuk masa yang akan datang Fraksi PKS berharap BPJT dapat memperketat kriteria Standar Pelayanan Minimal agar peristiwa banjir di jalan tol seperti ini dapat dicegah di masa yang akan datang," tutup Suryadi.

# Anggota FPKS Minta BPKN Buat **Troboosan Inovasi** Perlindungan Konsumen

**KUTIPAN**

Jakarta (21/02) --- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina pada Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI dengan Mitra Kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta BPKN meskipun dengan keterbatasan yang ada harus tetap fokus melindungi konsumen.

Saat ini, kata Nevi, terutama di masa pandemi, di masyarakat banyak melakukan pengaduan terkait sektor e-commerce seperti phising, refund hotel, tiket pesawat hingga OTP.

Nevi mengatakan, tiga isu fundamental penguatan kelembagaan edukasi dan sosialisasi masif sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen mesti dapat terealisasi.

Penguatan kelembagaan, edukasi dan sosialisas, dan Sinkronisasi kebijakan perlindungan Konsumen yang tersebar disejumlah sektor dan daerah.

"Isu kebijakan perlindungan konsumen ini mesti benar-benar dapat terealisasi di lapangan sehingga masyarakat

dapat merasakan langsung akan perlindungan konsumen ini. Jangan sampai, seluruh instrumen di BPKN terjebak hanya melakukan rutinitas. Adanya pimpinan yang baru saja dilantik, semoga lembaga ini dapat melakukan terobosan inovasi kreasi untuk perlindungan konsumen", Harap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa BPKN ini merupakan lembaga strategis dalam melayani masyarakat Indonesia. Dibawah presiden RI langsung tanggung jawabnya, BPKN harus mampu merumuskan dan merekomendasikan kebijakan perlindungan konsumen.

"Dalam hal penguatan perlindungan konsumen merata

hingga daerah-daerah, BPKN juga harus melakukan harmonisasi dengan LPKSM dan BPSK. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi konsumen di tingkat daerah," papar Nevi.

Namun saat ini, lanjut Politisi PKS ini, tidak semua wilayah mempunyai kedua lembaga ini, yakni LPKSM dan BPSK. Data Bappenas pada 2017 menunjukkan hanya ada 66,7% kabupaten/kota yang memiliki BPSK. Hal ini berakibat pada minimnya akses konsumen untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan advokasi terkait keluhannya pada transaksi e-commerce.

"Saat ini sudah sangat banyak aduan dari masyarakat dari selama tahun 2020. lebih dari 1.176 aduan telah ajukan terutama di sektor e-commerce. BPKN harus memiliki strategi kuat untuk mengatasi ini untuk melindungi hak konsumen", tutur Nevi,

Nevi menyarankan, agar Tingkat literasi konsumen dan keberadaan lembaga



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Isu kebijakan perlindungan konsumen ini mesti benar-benar dapat terealisasi di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung akan perlindungan konsumen ini. Jangan sampai, seluruh instrumen di BPKN terjebak hanya melakukan rutinitas"

perlindungan konsumen harus semakin di masifkan sebagai program andalan. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang begitu besar, agar program tersebut mempunyai desain yang efektif

dan mengutamakan daerah. Karena saat ini banyak daerah tanpa lembaga perlindungan konsumen dan dengan IKK rendah. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



PKS

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Dr. Mulyanto**   
Anggota Fraksi PKS DPR RI



Hati-hati pasal kerumunan.  
Karena ada pilih-tebang dan tebang-pilih.  
Ada juga standar ganda.  
Dan keteladanan pemimpin.  
Bagaimana covid mau cepat pergi, kalau seperti ini.

8.31 AM · 25 Feb 2021 · Twitter for iPhone



fraksi.pks.id



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@pkspdprri



PKS TV DPR RI

# Aleg PKS: Pemerintah Harus Hati-Hati Terkait Implementasi Royalti Batu Bara 0%

**KUTIPAN**

Jakarta (23/02) --- Terkait pemberlakuan kebijakan royalti 0% bagi perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah selektif dan berhati-hati.

Pemerintah harus memperhatikan ketentuan UU Minerba terkait hilirisasi batu bara. Sehingga pendapatan negara atas hilirisasi batu bara lebih besar daripada penerimaan negara dari royalti selama ini.

Mulyanto minta Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengawasi betul pelaksanaan ketentuan ini. Jangan sampai klausul ini menjadi modus baru bagi kebocoran keuangan negara.

"Jadi harus jelas dan definitif kriteria pengusaha yang melaksanakan hilirisasi tersebut, yang dibuktikan dengan adanya produk hilirisasi yang ekonomis. Bukan sekedar

asal-asalan sekedar memenuhi formalitas persyaratan untuk mendapat dispensasi 0% royalti," tegas Mulyanto.

Mulyanto berharap ketentuan ini dapat menekan nilai impor komoditas energi seperti gas LPG yang nantinya dapat menurunkan defisit transaksi berjalan sekaligus menguatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, lanjutnya, hilirisasi batu bara juga diharap dapat mengundang investasi, menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan keahlian serta menghasilkan multi flyer-effect bagi sektor ekonomi lain.

"Filosofinya sudah sangat bagus. Namun kalau pengatur-

an dan pengawasannya lemah maka bisa jadi dimanfaatkan sebagai celah bagi pengusaha tambang untuk lari dari kewajiban membayar royalti mereka kepada negara," imbuh Mulyanto.

Sebelumnya Pemerintah mengeluarkan aturan pembebasan royalti bagi perusahaan perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi, Senin (22/02/2021).

Hal ini seiring dengan terbitnya turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Aturan pembebasan royalti itu tercantum dalam Bab II Pasal 3. Di dalamnya tertulis, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Hilirisasi batu bara juga diharap dapat mengundang investasi, menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan keahlian serta menghasilkan multi flyer-effect bagi sektor ekonomi lain. Filosofinya sudah sangat bagus. Namun kalau pengaturan dan pengawasannya lemah maka bisa jadi dimanfaatkan sebagai celah bagi pengusaha tambang untuk lari dari kewajiban membayar royalti mereka kepada negara

# Kunker ke PLN UP 3 Masohi, Uluputy Dorong Percepatan Layanan Listrik Pulau Seram

## KUTIPAN

Maluku (25/02) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Dapil Maluku, Saadiah Uluputy, didampingi Anggota DPRD Malteng, sambangi PT. PLN (PERSERO) UP3 Masohi, Rabu (24/02/2021).

Kunjungan kerja bertujuan untuk mengonfirmasi keluhan masyarakat terkait pemadaman, elektrifikasi, maupun masalah lainnya, dan persoalan ketersediaan infrastruktur jalur pelayanan di daerah jajaran UP3 Masohi.

Hal itu sebelumnya, telah disampaikan bahwa ada terdapat kendala teknis, dan gangguan, disebabkan faktor cuaca dan pohon tumbang.

"Jadi, masyarakat juga perlu bekerjasama dan membantu pemerintah guna menjaga jarak tanaman/pohon dengan jaringan PLN, yang menjadi keluhan PLN serta masyarakat, dan ini tanggungjawab kita bersama," ucap Uluputy.

Hal serupa juga disampaikan Arman Mualo, Anggota

DPRD Malteng Fraksi PKS, bahwa menurut keterangan dari masyarakat, pasca penyambungan daya dari Masohi, banyak mengakibatkan terjadinya pemadaman.

"Sebab ini keberlangsungannya sangat lama, jadi nantinya ada Perda, yang mengatur tentang cara penanaman pohon oleh masyarakat, supaya ada aturan atau regulasi yang mudah dipahami masyarakat dalam menjaga jalur kabel," Pungkas Mualo.

Sementara itu, pada persoalan kekurangan mesin, memang beberapa tahun ini belum ada pengadaan mesin baru oleh pemerintah, sehingga informasi ini menjadi catatan untuk diperjuangkan dalam rangka untuk offerhold atau

perawatan mesin hidup juga bisa teratasi.

Maka dalam mendorong infrastruktur dasar yang memang menjadi kebutuhan masyarakat selain energi, kata Uluputy, akan diupayakan juga untuk mendorong laju ekonomi pembangunan di Maluku, juga mendapat program strategis nasional baik itu blok masela kemudian juga di lumbung ikan nasional.

"Beberapa kali kunjungan dari pemerintah pusat kemarin di kota Ambon, dan juga Maluku Tengah, serta sekitar pulau Seram, akan dijadikan sebagai daerah terintegrasi, sehingga nantinya persoalan kelistrikan sudah tidak menjadi masalah," Beber Uluputy.

Nah, di beberapa COD, lanjut Srikandi Maluku ini, pemerintah dalam hal ini menteri ESDM telah menyampaikan planning nya, soal bagaimana listrik di Maluku dalam konteks UP3 masohi.

"Ternyata telah membawahi 18 sistem, sehingga kita perlu mendorong agar semua itu bisa selesai dan masyarakat bisa menikmati listrik dengan baik," tutup Uluputy.



**SAADIAH ULUPUTY, S.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Beberapa kali kunjungan dari pemerintah pusat kemarin di kota Ambon, dan juga Maluku Tengah, serta sekitar pulau Seram, akan dijadikan sebagai daerah terintegrasi, sehingga nantinya persoalan kelistrikan sudah tidak menjadi masalah"



# Aleg PKS Masih **Temukan** Sejumlah Persoalan Krusial Soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

## KUTIPAN

Semarang (20/02) --- Angka kemiskinan di sejumlah kota di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 menerjang.

Tidak terkecuali bagi Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Salah satu masalahnya, pandemi membuat sektor ekonomi menjadi lesu sehingga sejumlah industri terpaksa melakukan kebijakan pengurangan karyawan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan, isu kemiskinan yang meningkat harus menjadi perhatian bersama dan menuntut strategi kolosal yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

"Data BPS pada tahun 2019 menunjukkan angka kemiskinan di Kota Semarang berkisar di angka 3,98%. Akan tetapi di tahun selanjutnya, mengalami lonjakan sehingga menyentuh angka 4,34%," ungkap Bukhori saat audiensi dengan Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka

menyerap aspirasi.

Selanjutnya, Bukhori menyampaikan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam upaya menurunkan kemiskinan. Salah satunya adalah permasalahan validasi data warga miskin yang dinamis akibat pandemi.

Bukhori menjelaskan bahwa proses penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya terkait verifikasi data kemiskinan sedang dalam tahap pembahasan di panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR.

"Dalam keberjalanan verifikasi data kemiskinan, kami menemukan permasalahan mendasar di lapangan. Sebagai contoh misalnya untuk kasus di Kota Semarang dimana data penerima manfaat bantuan sosial mengalami ketidakselarasan antara data

pusat dengan data NIK di daerah," ujarnya.

Berikutnya, Anggota Baleg ini juga menyoroti permasalahan model verifikasi data bantuan yang berbasis kepala keluarga. Padahal, menurutnya, dalam satu keluarga bisa terdapat lebih dari satu kepala keluarga.

"Artinya, jika tetap mengacu pada model verifikasi tersebut, maka akan ada banyak kepala keluarga yang tidak menerima bantuan. Karena itu, saya usulkan sebaiknya bantuan diberikan dengan mengacu pada basis kartu keluarga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jateng 1 ini akan mengadvokasi permasalahan verifikasi data kemiskinan di Komisi VIII DPR RI.

"Verifikasi data kemiskinan menjadi hal yang urgen untuk segera diselesaikan pemerintah. Jangan sampai ada lagi masalah exclusion error, dimana warga miskin yang seharusnya berhak memperoleh



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Verifikasi data kemiskinan menjadi hal yang urgen untuk segera diselesaikan pemerintah. Jangan sampai ada lagi masalah exclusion error, dimana warga miskin yang seharusnya berhak memperoleh bantuan, tetapi tidak tercatat di pusat data,"

bantuan, tetapi tidak tercatat di pusat data," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bukhori turut mengapresiasi Dinas Sosial Kota Semarang atas kinerjanya dalam kelengkapan data kemiskinan. Untuk diketahui, Kota Semarang berada di urutan ke-8 dari 514 kota/kabupaten yang memiliki data kemiskinan

terverifikasi paling lengkap.

"Kami mendorong Kota/Kabupaten yang lain agar bisa seperti Kota Semarang dalam hal pencapaian kinerja terkait verifikasi data. Semoga ke depannya akan ada peningkatan ke arah lebih baik dengan orientasi semata-mata untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," pujiya.

# Masyarakat Terdampak Covid-19 Meningkat, Aleg PKS Dorong Pemkot Bekasi Perbaiki DTKS

**KUTIPAN**

Bekasi (22/02) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data rujukan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat tidak mampu.

Menurut Nur Azizah, hal itu penting untuk segera dilakukan, pasalnya di masa pandemi angka kemiskinan meningkat karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Hal tersebut disampaikan Nur Azizah pada Jumat (19/02/2021) dalam agenda Reses ke-1 Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 di Gor Candrabraga Kota Bekasi.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Perwakilan Dinas Sosial serta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bekasi.

Dalam kesempatan ini,

Nur Azizah turut mensosialisasikan terkait SKB tiga Menteri yang dikeluarkan bulan Juli 2020, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri, tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Adanya SKB 3 Menteri ini merupakan perintah kepada jajaran pemerintah kota dan kabupaten yang di tahun 2021 ini harus segera melakukan perbaikan DTKS. Dimana permasalahan DTKS ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Semua Anggota

Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 54 orang, saat reses dan kundupil selalu mendapatkan aduan terakrit carut-marut DTKS di dapilnya", papar Nur Azizah.

Nur Azizah sebagai anggota dewan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan, mengajak pemerintah kota dan kabupaten, khususnya Pemerintah Kota Bekasi dan Depok yang menjadi Dapil Nur Azizah, agar bersama-sama Dinas Sosial, pimpinan di setiap Kecamatan, Kelurahan hingga RT dan RW untuk sama-sama berkomitmen menyelesaikan perbaikan DTKS ini.

"Seluruh Jajaran Pemerintahan kota ke bawah hingga RT dan RW, Bersama Dinasos Kota Bekasi harus sama-sama berkomitmen dalam perbaikan data ini. Kita saat ini dituntut cepat dan akurat dalam pendataan. Pada TA 2021, Kemensos bahkan sudah mengalokasikan dana khusus dari APBN sebesar 1,4 T untuk perbaikan DTKS. Tidak ada alasan untuk kita menunda perbaikan ini", terang Nur



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

“Adanya SKB 3 Menteri ini merupakan perintah kepada jajaran pemerintah kota dan kabupaten yang di tahun 2021 ini harus segera melakukan perbaikan DTKS. Dimana permasalahan DTKS ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia”

Azizah.

Sementara itu, Rahmat Effendi mengaku, dirinya beserta jajaran Dinasos Kota Bekasi sudah mulai merancang proses perbaikan DTKS ini.

Rahmat mengaku hingga saat ini memang belum

mengetahui adanya SKB 3 Menteri, namun, meskipun begitu menurutnya itu tidak menjadi alasan, untuk menunda perbaikan DTKS di Kota Bekasi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# HNW Tolak Penghapusan Santunan untuk Korban Meninggal Covid-19 Oleh Kemensos

**KUTIPAN**

Jakarta (23/02) --- Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengkritisi dan menolak penghapusan santunan korban meninggal akibat Covid-19,

dan menuntut untuk mencabut surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Sosial; No. 150/3/2/BS.01.02/02/2021.

Dalam edaran tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kementerian Sosial menyatakan tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat covid-19 bagi ahli waris pada Kementerian Sosial tahun anggaran 2021.

Menurut Hidayat, penghapusan itu tak sesuai dengan Sila 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab', juga tak sesuai dengan keputusan bersama Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI yang sejak tahun 2020 telah bersepakat membuat anggaran yang empati kepada korban covid-19 apalagi yang meninggal akibat covid-19 agar

bisa menyantuni keluarga korban.

Penghapusan santunan itu juga, imbuh HNW, tak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mewajibkan Pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat tanggap darurat bencana.

"Selain tak sesuai kesepakatan di DPR dan UU 24/2007, pembatalan dana santunan sosial ini juga tidak menampilkan sikap kenegarawanan dengan empati kepada rakyat yang terkena musibah bencana. Padahal anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar, dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp 518 an Miliar untuk santunan korban Covid-19 atau hanya

sebesar 0,07% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 Triliun", disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/02).

HNW sapaan akrabnya mengingatkan, sejak peluncuran program perlindungan sosial oleh Presiden pada 4 Januari 2021, dirinya telah mengkritik adanya pengurangan anggaran perlindungan sosial di Kemensos, dan mendorong agar anggaran tersebut setidaknya sama atau bahkan lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya, karena adanya fakta semakin bertambahnya korban meninggal dan pasien terpapar covid-19 pada tahun 2021.

"Di tahun 2020, anggaran perlindungan sosial Kemensos mencapai Rp 128,9 Triliun, namun untuk tahun 2021 malah dipangkas menjadi Rp 110 Triliun," ungkapnya.

Dirinya menilai Pemerintah telah salah fokus melaksanakan kewajiban terhadap Rakyat Indonesia yang



Foto : Istimewa

## Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Penghapusan itu tak sesuai dengan Sila 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab', juga tak sesuai dengan keputusan bersama Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR-RI yang sejak tahun 2020 telah bersepakat membuat anggaran yang empati kepada korban covid-19 apalagi yang meninggal akibat covid-19 agar bisa menyantuni keluarga korban"

harusnya dilindungi apalagi saat darurat bencana nasional seperti covid-19.

"Bandingkan dengan misalnya besarnya dana talangan Pemerintah untuk kerugian BUMN akibat korupsi seperti Jiwasraya hingga Rp 20

Triliun, namun di saat yang sama malah mengurangi bantuan sosial sebesar Rp 18,9 Triliun, dan menghapus santunan korban Covid-19 pula," tutur HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Happy Wedding  
Anniversary

49 year

Selamat ulang tahun perkawinan yang ke 49  
untuk **Bapak Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun**  
& **Ibu Nunun Nurbaetie**

Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT,  
diberikan umur yang panjang dan menjadi keluarga  
Sakinah Mawadah Wa Rahmah.

Salam hangat dari kami  
Fraksi PKS DPR RI

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Assalamu'alaikum w. w. Sukabumi, Februari

Djika Tuhan J. M. E. meridhoi, kami bermaksud akan merajakan Pernikahan anak kami :

*Nurbaetie Dulhiflie (Nunun)*

dengan

*Daradjatun Djuanaedi (Adang)*

Pada hari/Tanggal : Minggu, 27 Februari 1972  
Bertempat di : Djl. Gudang No. 2 Sukabumi  
D j a m : 12.00 s/d 15.00 w. i. b.

Besar harapan kami, Ibu/Bapak/Sdr. untuk hadir memberikan do'a restu, terima kasih.  
Wassalam,

*Kel. Dulhiflie*

*Kel. R. A. Djuanaedi*

Akad Nikah djam 9.00 w. i. b.



# Lindungi Hak Pekerja, Direksi dan Dewas Baru Wajib Selamatkan Investasi Dana BPJS Ketenagakerjaan

## KUTIPAN

Jakarta (20/02) --- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendesak pengumuman yang transparan tentang ada tidaknya dugaan kasus investasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Mufida meminta kepastian hasil investigasi ada tidaknya kerugian negara demi kepastian hak dana para pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru wajib menjaga dana para pekerja yang diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan", sebut Mufida.

Menurut data, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja.

Sementara jumlah kepe-

sertaan BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Dari jumlah itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PMI yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang.

"Ada lebih dari 50 juta pekerja yang dananya dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerjalah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga menjadi penting agar segera diumumkan secara terbuka dan apa adanya tentang tindak lanjut penyidikan

hasil audit BPK yang sudah diserahkan ke Kejaksaan," kata Mufida dalam keterangannya, Sabtu (20/02).

Mufida meminta proses pengusutan hukum yang berjalan bisa transparan dan akuntabel. Para pekerja baik di dalam negeri maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah harap-harap cemas menanti perkembangan dugaan kasus ini. Kepastian ini juga berfungsi untuk menjawab keraguan publik dan kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Tentu kita mendukung setiap upaya penegakan hukum. Bersamaan dengan itu publik terutama para pekerja berhak mendapat kepastian status hukum dari dugaan kasus yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Wajar para pekerja menjadi khawatir setelah kejadian yang menimpa Jiwasraya dan Asabri. Agar tidak berandai-andai, maka harus clear status hasil audit ada kerugian yang disengaja atau tidak," tutur Mufida.

Ia menyebut ada 29,12 juta pekerja yang terdampak akibat Pandemi Covid-19. Dari



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Ada lebih dari 50 juta pekerja yang dananya dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerjalah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga menjadi penting agar segera diumumkan secara terbuka dan apa adanya tentang tindak lanjut penyidikan hasil audit BPK yang sudah diserahkan ke Kejaksaan"

angka tersebut, sekitar 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan sekitar 760 ribu orang masuk dalam bukan angkatan kerja

sebagai akibat dari pandemi.

Begitu juga dengan PMI yang sebagian harus kembali pulang ke Tanah Air hingga belum dibukanya pintu penempatan di beberapa negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Ingatkan Pemerintah Soal Kerumunan, Aleg PKS: Pemerintah Harus Jadi Teladan Bagi Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (27/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengingatkan, agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan.

Menurut Netty hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya COVID-19.

"Saat ini jumlah kasus per Jum'at, 26 Februari 2021 sudah mencapai 1.322.866 kasus positif, dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Bisa jadi prediksi Kemenkes bahwa kasus COVID-19 pada akhir 2021 mencapai 1,7 juta akan terlampaui," kata Netty dalam keterangan medianya, Sabtu (27/02).

"Dengan kondisi ini, tidak pantas jika gelaran kegiatan menimbulkan kerumunan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik" tambah Netty.

Melawan pandemi COVID-19, kata Netty harus dengan menghimpun segenap daya,

upaya dan energi bangsa Indonesia.

"Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, influencer dari berbagai kalangan harus menjadi penggerak dan teladan di masyarakat dalam melawan pandemi. Rakyat harus dihimpun dan digerakkan dengan leadership dan keteladanan. Jika pejabat pemerintah tidak menunjukkan keteladanan, maka jangan salahkan rakyat jika tidak taat prokes dan bersikap masa bodoh" terangnya.

Ketua DPP PKS ini meminta agar pejabat pemerintah dapat memastikan langkah antisipatif setiap kali membuat kegiatan agar tidak memicu terjadinya spontanitas kerumunan rakyat.

"Jika kegiatannya memba-

gi-bagi atau melempar barang, tentu saja rakyat yang memang sedang kesulitan ekonomi akan berebut untuk mendapatkannya. Sebaiknya dipikirkan bentuk kegiatan lain yang lebih humanis, kreatif dan mendidik, sehingga prokes terjaga, rakyat pun aman" Katanya.

Netty mengingatkan bahwa meskipun Indonesia sedang menjalankan proses vaksinasi bukan berarti sudah bebas COVID-19.

"Sampai saat ini kasus COVID-19 masih belum terkendali, artinya walaupun kita sedang melakukan vaksinasi bukan lantas mengurangi upaya penanganan dan prokesnya. Mereka yang divaksin juga tidak lantas langsung kebal. Bahkan, jangan sampai proses vaksinasi justru menjadi tempat terjadinya kerumunan seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang dan lainnya. Selain itu, penerapan aturan seperti larangan berkerumun harusnya berlaku bagi siapa saja, rakyat biasa maupun pejabat pemerintah. Begitu juga dengan sanksi yang mengikutinya jika terbukti melanggar. Aparat



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

**"Rakyat harus dihimpun dan digerakkan dengan leadership dan keteladanan. Jika pejabat pemerintah tidak menunjukkan keteladanan, maka jangan salahkan rakyat jika tidak taat prokes dan bersikap masa bodoh"**

penegak hukum tidak usah tebang pilih dalam menjalankan tugasnya", katanya.

Terakhir Netty mengingatkan agar semua pihak tidak menganggap remeh pandemi COVID-19.

"Jangan anggap remeh penyakit ini. Kebijakan 3T harus ditingkatkan lebih masif lagi,

gerakan 3M harus semakin ketat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesehatan rakyat. Oleh karena itu, berikanlah contoh yang baik agar bisa menjadi teladan di tengah masyarakat dan bukan sekedar jargon saja," kata Politisi PKS asal Jawa Barat ini.

# Ingatkan Kemendikbud, Aleg PKS: Dana BOS Terlambat, **Jadi Penghambat** Kegiatan Sekolah

## KUTIPAN

Jakarta (24/02) — Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu andalan sekolah dalam melakukan kegiatan operasional. Keterlambatan pencairan dana BOS ini tentu saja menjadi salah satu penghambat kegiatan sekolah.

“Selama ini dana BOS dikirim per catur wulan, itupun sering terlambat. Sudah terlambat begitu, ketika cair kadang baru cair sebagian saja, dana untuk dua bulan, sehingga menghambat kegiatan operasional sekolah,” Demikian keluhan yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah SMPN 56 Kota Bandung kepada Ledia Hanifa Amaliah, Anggota Komisi X DPR RI saat tengah melakukan kunjungan di masa reses.

Karena keterlambatan cairnya dana BOS ini maka pihak sekolah terpaksa harus mencari jalan untuk bisa memenuhi kebutuhan sekolah yang rutin, termasuk dengan mencari pinjaman kesana

kemari.

“Sebagian dana BOS kan menjadi andalan kami untuk membayar guru honor, juga untuk kebutuhan operasional rutin, kalau terlambat lalu keluarnya juga baru sebagian sementara honor guru dan operasional kan tidak bisa dtunda maka kami sampai terpaksa harus berhutang,” lanjut wakepek ini pula.

Keluhan yang sama ternyata juga muncul ketika aleg dari Fraksi PKS ini melakukan kunjungan ke SDN 105 Panyileukan, dan SMP Muslimin 5 Cibiru Kota Bandung.

“Keluhan soal keterlambatan dana BOS ini merata di semua kunjungan kali ini.

Apalagi buat sekolah swasta, ketika pemasukan mereka berkurang karena orangtua siswa banyak yang terdampak pandemi, maka dana BOS sangat diandalkan buat keberlangsungan operasional sekolah. Sayangnya pecairannya kerap terlambat sehingga mengganggu operasional sekolah.” jelas Ledia

Pembayaran guru honorer menjadi ganjalan besar. Padahal baik di sekolah negeri maupun swasta jumlah guru honorer masih mendominasi. Apalagi jika guru honorer tersebut belum memiliki sertifikasi, maka pemasukan para guru ini praktis hanya berasal dari anggaran dana BOS, tidak ada tunjangan tambahan.

“Karena dana BOS buat membayar honor ini lama cairnya, maka guru-guru honor ini juga akhirnya cari-cari penghasilan tambahan buat memenuhi kebutuhan hidup.” Kata Kepala Sekolah SMP Muslimin 5, Cibiru.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

“Keluhan soal keterlambatan dana BOS ini merata di semua kunjungan kali ini. Apalagi buat sekolah swasta, ketika pemasukan mereka berkurang karena orangtua siswa banyak yang terdampak pandemi, maka dana BOS sangat diandalkan buat keberlangsungan operasional sekolah. Sayangnya pecairannya kerap terlambat sehingga mengganggu operasional sekolah

# Gerakan Nasional Wakaf Uang, Aleg PKS: Momentum Pengembangan Potensinya di Tanah Air

## KUTIPAN

Jakarta (21/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menanggapi terkait dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang baru-baru ini diinisiasi oleh Pemerintah.

Pada acara Webinar Nasional Seri Literasi Ekonomi dan Keuangan Islam yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia (ILUNI PSKTTI SKSG UI) dan Sharia Community, Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan bahwa pada Pemerintahan sebelumnya GNWU sudah mulai diperkenalkan.

"Sebenarnya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) bukanlah sesuatu yang baru Gerakan serupa pernah diluncurkan oleh Presiden SBY pada pada 8 Januari 2010," ungkap Anis Byarwati, Sabtu (20/02/2021).

Pada acara dengan topik "Wakaf Uang: Kenapa Ada

Keramaian? ini, Anis menegaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun, sudah dua kali peluncuran GNWU dilaksanakan oleh Kepala Negara, tetapi belum terlihat ada progress yang signifikan.

"Lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang pada tahun 2002, merupakan tonggak sejarah dari lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Agama dan Peraturan BWI," terang Anis.

Stagnannya perkembangan wakaf, imbuhnya, juga bisa terlihat dari perkembangan regulasi yang melingkupinya.

Usia UU No. 41 Tahun 2004, sudah lebih dari 16 tahun.

"Dan bisa dipastikan beberapa hal yang terkait dengan aturan pengelolaan Wakaf sudah sangat ketinggalan zaman, karena pesatnya perkembangan teknologi informasi," ujar Anis.

Menanggapi peluncuran GNWU oleh Presiden Jokowi ditengah kondisi perekonomian nasional yang sedang mengalami resesi, Anis mengatakan, hal tersebut tentu menimbulkan banyak spekulasi bahwa wakaf yang terkumpul akan dipakai Pemerintah untuk membantu membiayai program pembangunan.

Walaupun Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengklarifikasi bahwa dana yang terkumpul dari GNWU tidak masuk ke dalam kas negara.

"Tetapi, kecurigaan publik tentu tidak bisa dihindari, mengingat potensi wakaf yang kita miliki sangat besar," kata Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai bahwa potensi wakaf yang dimiliki Indonesia sangat



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

"Peningkatan literasi ini sangat penting, untuk memberikan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan wakaf uang. Dalam hal ini terkait proses digitalisasi, inovasi produk serta layanan dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU),"

besar, tetapi sampai hari ini belum dioptimalkan dengan baik.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, potensi aset wakaf per tahun bisa mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hectare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun.

Adapun jumlah Nazir Wakaf Uang sekitar 250 Lembaga, dengan jumlah Nazir Wakaf

Asset, baik perorangan maupun lembaga sekitar 313.000. Saat ini potensi wakaf yang terrealisasi baru sebesar Rp 400 miliar. Bahkan dengan Singapura yang notabene bukan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan jumlah penduduk hanya 5,8 juta jiwa, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), mampu membantu kehidupan masyarakat Muslim di Singapura secara rutin.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id





***Mari Tetap  
Patuhi Protokol  
Kesehatan***

# Banjir di Sejumlah Wilayah, Wakil Ketua FPKS Minta PLN Lebih Siaga

## KUTIPAN

Jakarta (21/02) --- Untuk mengantisipasi berbagai kejadian akibat banjir, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta PLN menyiapkan tim siaga banjir.

Menurut Mulyanto, tim PLN harus siap 24 jam melayani masyarakat yang memerlukan bantuan terkait pengadaan maupun pemadaman listrik.

"Jangan sampai dalam kondisi banjir seperti sekarang terjadi musibah susulan akibat aliran listrik liar atau korsleting listrik," kata Mulyanto.

PLN, imbuhnya, perlu menyiapkan tim khusus untuk melakukan siaga banjir dengan mematikan listrik di wilayah terdampak banjir.

"Sehingga tidak menimbulkan bahaya kelistrikan, karena stop kontak aktif di dalam rumah-rumah yang terendam air. Namun demikian, setelah air surut dan aman dapat segera dinyalakan kembali," kata Mulyanto usai memberikan bantuan sosial di 13 titik lokasi

banjir di 11 kecamatan se-Tangerang Raya, Sabtu (20/2).

Selain itu Mulyanto juga minta kepada Pemerintah agar memperpanjang stimulus listrik yang rencananya akan berakhir Maret 2021.

Mulyanto menilai pandemi Covid-19 belum reda, ekonomi masyarakat belum pulih benar, karena itu upaya yang sudah baik dari Pemerintah cq. PLN dalam meringankan beban masyarakat terkait pembebasan dan diskon listrik untuk masyarakat ini penting untuk diteruskan.

"Paling tidak sampai akhir tahun 2021 atau sampai pandemi ini berakhir serta ekonomi masyarakat pulih," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.



## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III



"PLN, perlu menyiapkan tim khusus untuk melakukan siaga banjir dengan mematikan listrik di wilayah terdampak banjir. Sehingga tidak menimbulkan bahaya kelistrikan, karena stop kontak aktif di dalam rumah-rumah yang terendam air. Namun demikian, setelah air surut dan aman dapat segera dinyalakan kembali

# Selesai Direnovasi, Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta Diresmikan

## KUTIPAN

Surakarta: Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun proses renovasi yang menelan anggaran sekitar 6,8 M, gedung kesenian Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta akhirnya diresmikan, pada, Rabu (17/2/21) malam.

Peresmian ditandai dengan pemukulan gong, dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyahari yang didampingi Direktur Utama LPP RRI Surakarta M Rohanudin.

Turut hadir dalam peresmian, Direktur Program dan Produksi RRI Soleman Yusuf, Direktur SDM dan Umum Nurhanudin, Kapuspem Widhi Kurniawan, Kepala SLN Agung Susatya, Anggota dewan pengawas RRI Hasta Kuncara dan Dwi Hernuningsih, Kepsta RRI Surakarta Sjahbana Bahdar, dan Kepsta se-Jawa. Peresmian itu juga

diwarnai, Pemberian penghargaan kepada seniman maestro Keroncong Waljinah, Tokoh masyarakat yang ksenon pada budaya mantan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Mangkunegoro VII yang memberikan hibah tanah untuk RRI surakarta.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyahari mengungkapkan, tingginya antusias masyarakat dan seniman di kota Surakarta dalam menikmati pertunjukan kesenian, jadi salah satu alasan pentingnya renovasi, mengingat perlu adanya penyesuaian dalam perkembangan jaman.

"Saat tahun 2016 berkunjung ke RRI, suasana masih seperti awal pembangunan, setelah melihat animo masyarakat dan seniman antusias memanfaatkan gedung, langkah baiknya perlu renovasi penyesuaian jaman," ungkapnya saat menyampaikan sambutan peresmian gedung Sarsito Mangunkusumo.

Maka, lanjut Wakil Ketua Komisi 1, diharapkan, Gedung Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta menjadi wadah untuk aktualisasi para seniman dalam mencurahkan karya seninya sehingga dapat dinikmati masyarakat.

"Semoga gedung ini jadi tempat mengaktualisasikan Seniman untuk menampilkan seluruh karyaseniannya agar bisa dinikmati masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI M Rohanudin mengatakan, Gedung Sarsito Mangunkusumo merupakan salah satu tempat bersejarah yang tidak dapat lepas dari perkembangan kesenian di Indonesia, khususnya di Surakarta.

"Tidak bisa kita lupakan, gedung ini sebagai salah satu sejarah bangsa Indonesia. Warga surakarta yang mampu mengembangkan budaya lokal untuk nusantara, bahkan dunia," katanya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

“Tingginya antusias masyarakat dan seniman di kota Surakarta dalam menikmati pertunjukan kesenian, jadi salah satu alasan pentingnya renovasi, mengingat perlu adanya penyesuaian dalam perkembangan jaman.”



# Kunjungi Dapil, Rofik Ajak Masyarakat Jaga Rasa Persatuan dan Kesatuan

## KUTIPAN

Purbalingga (21/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dapil Jawa Tengah VII Rofik Hananto melakukan sosialisasi di Daerah Pemilihan (Sosdapil) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah..

Acara ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kab. Purbalingga Fraksi PKS Aris Widiarso, Camat Purbalingga Raharjo Minulyo, Kepala Desa Jatisaba Endah Herni Utari, Sekretaris DPD PKS Purbalingga Misyono, Ketua DED DPD PKS Purbalingga Afiq Yunan A., Para tokoh masyarakat dan pemuda Desa Jatisaba, pada Jumat (19/02).

Kegiatan ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR.

"Sosialisasi 4 pilar Kebangsaan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Karena 4 pilar ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Rofik.

Menurut Rofik, masyarakat perlu mendapatkan pengingat terus terkait 4 pilar ini, termasuk generasi muda yang hari ini input terkait dengan ini terkadang tidak seperti generasi sebelumnya yang cukup banyak mendapatkan pemahaman tentang hal ini.

Keempat pilar ini terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa.

"4 pilar ini merupakan modal untuk membangun bangsa yang majemuk. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif terhadap materi tersebut merupakan suatu keharusan dan kebutuhan, saya juga mengajak kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar keutuhan NKRI ini dapat tetap terjaga" ujarnya.

Kepala Desa Jatisaba Endah Herni Huntari menyampaikan terima kasih atas diadakannya sosialisasi ini di desanya. Hal ini penting untuk mengingatkan kembali apa yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan NKRI.

"Terima kasih karena Pak Rofik Hananto adalah putra daerah Jatisaba yang membanggakan sehingga keberadaan beliau di DPR RI bisa untuk kemaslahatan masyarakat," ujarnya.

Menurut Kades Jatisaba, di tengah pandemi seperti sekarang ini, adanya sosialisasi 4 pilar kebangsaan diharapkan dapat memupuk rasa persatuan, kesatuan dan



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Empat pilar ini merupakan modal untuk membangun bangsa yang majemuk. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif terhadap materi tersebut merupakan suatu keharusan dan kebutuhan, saya juga mengajak kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar keutuhan NKRI ini dapat tetap terjaga

persaudaraan.

Sementara itu selain sosialisasi 4 pilar kebangsaan, dalam kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan sosial berupa sembako untuk membantu masyarakat

yang terdampa Covid-19 yang secara simbolis diterima oleh Kepala Desa Jatisaba.

Di samping itu, Rofik juga menerima aspirasi dari masyarakat Desa Jatisaba serta menyampaikan berbagai hal yang sudah dilaksanakan untuk membantu masyarakat.



**PKS**

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# Selamat

## **MILAD KE-54 DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA (DDII)**

26 Februari 1967-26 Februari 2021

Semoga senantiasa istiqamah dalam mengemban  
amanah risalah untuk mewujudkan  
cita-cita mulia. Aamiin

# Temui Pengungsi, Anis Doakan Banjir Cepat Surut dan Aktivitas Warga Kembali Normal

## KUTIPAN

Jakarta (22/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menemui para pengungsi Banjir pada dua titik, Ahad (21/02/2021).

Anis sempat berbincang dengan beberapa pengungsi yang menyampaikan harapan-harapannya.

"Beberapa menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di lingkungan mereka serta mencari solusi agar banjir dapat dikendalikan," ungkap Anis.

Dalam pesannya kepada para pengungsi juga, Anis menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi banjir dan berpesan agar para pengungsi bersabar menghadapi situasi sulit ini.

"Saya dan kita semua berharap banjir segera surut dan warga dapat beraktivitas normal kembali," ujar Anis.

Anis memulai kunjungannya dengan meninjau

Dapur Umum PKS yang didirikan di rumah salah satu warga di bilangan Cipinang Muara.

Di Dapur Umum PKS ini, Anis disambut oleh ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPC Cipinang Muara, Tisnowati. Tak hanya meninjau, Anis juga turut masuk dan berkegiatan bersama apa saat di Dapur Umum ini.

Untuk memasok makanan siap saji bagi warga terdampak banjir, Dapur Umum ini rata-rata memasak sebanyak seribu porsi setiap harinya.

Lokasi selanjutnya yang dikunjungi Anis adalah tempat pengungsian di RW.13 Cipinang Bali.

Selain bertemu dengan para pengungsi, di lokasi ini

Anis bertemu dengan lurah Cipinang Bali, ketua RW 13 dan ibu-ibu para penggerak PKK yang menjadi relawan tanggap darurat.

Terakhir, perempuan yang berdomisili di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur ini mengunjungi lokasi pengungsian dan dapur umum di Mesjid Al-Muqorrobini, Cipinang Bali.

Dapur umum ini dikelola oleh sejumlah warga yang dikomandani Ika Mustikowati. Setiap harinya, dapur umum ini memasak sebanyak 1050 porsi untuk makan pagi, siang dan malam.

Dalam kunjungannya kali ini, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini berkeliling bersama dengan Ketua BPKK DPP PKS, Kurniasih Mufidayati dan jajarannya, Ketua BPKK DPW PKS, Aan Anita dan jajarannya, serta sejumlah pengurus BPKK DPD dan DPC. Anis sendiri menyerahkan sejumlah bantuan dana di setiap titik yang dikunjunginya.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Beberapa menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan di lingkungan mereka serta mencari solusi agar banjir dapat dikendalikan. Saya dan kita semua berharap banjir segera surut dan warga dapat beraktivitas normal kembali."



# Isi Kuliah Umum di Poltek Purbaya Tegal, Fikri: Kampus Vokasi Harus Hasilkan Milenial Inovatif

## KUTIPAN

Tegal (26/02) -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta kampus vokasi harus banyak memproduksi lulusan milenial yang inovatif di era internet sebagai segalanya (internet of Things) seperti saat ini.

"Karena milenial dituntut menjadikan ide-ide inovatif sebagai modal utama untuk berkarya dan tampil sebagai pemenang," ujar Fikri saat tampil dalam narasumber utama dalam kuliah umum seputar ekonomi kreatif di Politeknik Purbaya Kabupaten Tegal, Rabu (25/02/2021).

Fikri didaulat tampil sebagai pembicara bersama Bupati Tegal, Umi Azizah, dihadapan kurang lebih 500 peserta yang hadir secara fisik maupun virtual.

Kuliah umum digelar sesaat setelah acara penandatanganan MoU kerjasama antara Politeknik Purbaya dengan Pemerintah Kabupaten

Tegal dalam pengembangan Politeknik Teknopreneur.

Fikri menyampaikan, di era internet of things saat ini gagasan adalah yang paling utama. "Ideas are your only currency," katanya mengutip judul buku karya Rod Judkins.

Fikri menambahkan, sebagai kampus pendidikan vokasi, Politeknik Purbaya tidak boleh berhenti untuk terus melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan sumbangsih bagi Kabupaten Tegal.

"Kampus harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, yang certified, yang siap menghadapi dunia usaha dan industri, dengan memanfaatkan

kemajuan teknologi," katanya.

Di era ketidakpastian ini, lanjut Fikri, rumus sukses itu tetap sama, yakni gabungan antara kapasitas dan integritas.

"Dalam bahasa yang lebih relijius, integritas bisa kita maknai takwa," katanya.

Bupati Tegal Umi Azizah mengapresiasi langkah Politeknik Purbaya yang turut membantu pemerintah dengan melakukan pendampingan desa untuk digali potensi terbaiknya dan mengenalkan produk unggulannya dengan memanfaatkan IT. "Gagasan besar biasanya lahir dari hal-hal kecil," katanya.

Umi Azizah juga mendorong Politeknik Purbaya agar terus berinovasi agar produk lokal bisa bersaing di tingkat global.

"Salah satu perilaku positif yang perlu dibangun kita menghargai produk lokal dan memikirkan caranya agar bisa bersaing di kancah global," katanya.

Sementara itu Direktur Politeknik Purbaya Supangat menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Sebagai kampus pendidikan vokasi, Politeknik Purbaya tidak boleh berhenti untuk terus melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan sumbangsih bagi Kabupaten Tegal. Kampus harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, yang certified, yang siap menghadapi dunia usaha dan industri, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

pendampingan 16 desa di Kabupaten Tegal untuk menggali potensi agar desa tersebut memiliki produk unggulan.

"Kami berharap langkah ini bisa menjadi solusi atas

persoalan pembangunan di Kabupaten Tegal serta implementasi dari gagasan yang bertumpu pada tiga pilar (triple helix), yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat," tutup Fikri.

# Selepas Isya, Presiden PKS Berikan Bantuan Korban Banjir di Kota Bekasi

## KUTIPAN

Syaikhu bersyukur karena banyak elemen masyarakat yang bergerak mandiri. Mereka berinisiatif memberikan bantuan dengan segala keterbatasannya. Dana dari kocek sendiri, patungan, dan jumlah relawan yang seadanya.

Bekasi (21/02) — Presiden PKS Ahmad Syaikhu meninjau lokasi banjir di Kota Bekasi, selepas Isya, Sabtu (20/2) dan memberikan bantuan. Salah satu yang dikunjungi di Perumahan Pondok Gede Permai.

Di tempat tersebut, ketinggian air mencapai dua meter. Rumah warga yang berlantai satu hanya terlihat atapnya. Tanggul jebol menjadi penyebabnya.

Syaikhu minta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk secepat mungkin mengatasi masalah ini.

"Pemkot Bekasi harus cepat bergerak menangani soal jebolnya tanggul. Perlu dicari akar masalah dan jalan keluar yang menyeluruh agar banjir

tidak terulang," ujar Syaikhu.

Banjir besar semacam ini sudah menjadi siklus tahunan. Berulang kali terjadi setiap tahunnya. Tapi sayangnya, persoalan yang sama juga terulang.

"Ini kan sudah sering terjadi. Tapi saya dapat info bantuan telat hadir, evakuasi yang lambat, perahu karet yang terbatas dan seterusnya. Padahal, jika kita bisa mengambil pelajaran, masalah-masalah di atas tak perlu lagi terjadi," ungkap Syaikhu.

Syaikhu bersyukur karena banyak elemen masyarakat yang bergerak mandiri. Mereka berinisiatif memberikan bantuan dengan segala keterbatasannya. Dana dari kocek sendiri, patungan, dan jumlah relawan yang seadanya.

"Saya sendiri merasa bangga dengan perjuangan kader-kader PKS di DPRa dan DPC. Padahal mereka juga menjadi korban banjir," ungkap Syaikhu lagi.

Ke depan, semua pihak terutama pemerintah setempat harus mampu melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

"Agar banjir yang berulang tak meninggalkan kisah yang sama setiap tahunnya. Sebab masyarakat yang pada akhirnya menjadi korban," kata Syaikhu.

Syaikhu juga minta agar warga yang mengungsi mendapat perhatian. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

"Di posko banyak warga yang mengungsi. Pastikan logistik dan kesehatan mereka," pungkas Syaikhu.

Di Kota Bekasi, ada 76 titik banjir sepanjang 19-20 Februari. Tersebar di 33 kelurahan dan 11 Kecamatan. Ribuan orang mengungsi.



## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Pemkot Bekasi harus cepat bergerak menangani soal jebolnya tanggul. Perlu dicari akar masalah dan jalan keluar yang menyeluruh agar banjir tidak terulang. Ini kan sudah sering terjadi. Tapi saya dapat info bantuan telat hadir, evakuasi yang lambat, perahu karet yang terbatas dan seterusnya. Padahal, jika kita bisa mengambil pelajaran, masalah-masalah di atas tak perlu lagi terjadi"



### Profil

- Nama Lengkap  
**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si**
- Tempat, Tanggal Lahir  
**Surabaya, 09 Maret 1967**
- Dapil  
**DKI Jakarta I (Jakarta Timur)**



### Pendidikan

- **D3 Akademi Pimpinan Perusahaan**, Jurusan Financial Management
- **S1 STAI Al-Hikmah Jakarta**, Program Intensif Berbahasa Arab, Fakultas Syarif'ah
- **S2 Universitas Indonesia**, Program Pascasarjana, Kekhususan Ekonomi Islam
- **S3 Universitas Airlangga**, Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam



### Riwayat Pekerjaan

- **Dekan Fakultas Ekonomi Univ. YARSI Jakarta**, 2014-2017
- **Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta**, 2017-2019
- **Dosen Universitas Airlangga Surabaya**
- **Anggota Badan Legislasi DPR RI**, 2019-2020
- **Anggota Komisi XI DPR RI**, 2019-sekarang



### Keluarga

- Suami : **H.M. Isbir Renwarin**
- Anak : **4 Laki-Laki**  
**4 Perempuan**



### Riwayat Organisasi

- **Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga IAEI DPW DKI Jakarta**, 2018-2021
- **Ketua Majelis Sarana Ekonomi Islam (MASEI) Wilayah DKI Jakarta**, 2017-2021
- **Ketua Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)**, 2012-2016
- **Anggota Forum Dosen Ekonomi Islam Indonesia (FORDEBI)**, 2016-sekarang
- **Ketua Bidang Perempuan DPP PKS**, 2010-2015
- **Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS**, 2020-2025



### Media Sosial

- Facebook : **Anisbyarwatipks**
- Instagram : **@anisbyarwatipks**
- Twitter : **@AnisbyarwatIPKS**



# ANIS BYARWATI

# Nur Azizah: Depok Harus Siapkan SDM Unggul Hadapi Tantangan dan Peluang Kehadiran Kampus UIII

## KUTIPAN

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A, ajak warga Depok untuk bersiap hadapi kehadiran kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),

hal itu disampaikan Nur Azizah dalam agenda Reses Anggota DPR RI Masa Persidangan Ke-3 Tahun 2020-2021 pada Sabtu (20/2) di Rumah Makan Saung Kang Dedi, Curug, Bojongsari, Kota Depok.

Menurut Nur Azizah, warga Depok harus bersiap hadapi setiap tantangan dan peluang dengan hadirnya Kampus UIII di Depok, salah satunya dengan menciptakan SDM yang unggul. Selain itu, Pemerintah Depok bersama warga harus dapat sesegera mungkin menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di kota Depok saat ini, seperti masalah pengaman anak-anak, pengalaman yang menggunakan cat silver, dan yang paling penting juga masalah

penanggulangan sampah.

“Jangan sampai ada kesan kumuh yang nampak dari Depok. Jangan sampai memperlakukan warga Depok dimata masyarakat Internasional yang nantinya akan tinggal di sini. Harus diperhatikan betul bahwa Depok akan menjadi magnet baru peradaban Islam dunia. Depok sudah punya UI lalu ada UIII, tentu itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kota Depok”, jelas Nur Azizah.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPC PKS Sawangan, Mustofa, seluruh Perwakilan DPRa PKS se Kecamatan Sawangan, serta perwakilan UPKK Kelurahan. Di hadapan para Kader PKS yang hadir, Nur Azizah menyampaikan bahwa

setiap kader PKS harus dapat mengambil peluang untuk dapat berkontribusi lebih di masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, menjadi bagian dari UIII.

“Karena Depok ini dikenal dengan pemerintahannya orang PKS, tentu hal itu harus diperhatikan betul agar terus dapat menciptakan iklim yang positif. Dan turut berkontribusi untuk membangun citra positif kader PKS dan warga Depok di mata dunia”, terang Nur Azizah.

Nur Azizah turut menjelaskan bahwa sejarah didirikannya kampus UIII, karena Indonesia mayoritas penduduknya muslim, perintah kemerdekaan Indonesia juga banyak digawangi oleh para ulama yang memiliki pondok pesantren, tapi kenapa tradisi keislaman Indonesia ini tidak muncul di mata dunia, bahkan banyak orang-orang Indonesia yang belajar agama Islam ke luar negeri, mereka berangkat sekolah ke negara-negara yang taraf ekonominya bahkan lebih rendah dari Indonesia seperti di Maroko, Sudan dan Yaman. Tidak hanya itu mahasiswa



**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

Harus diperhatikan betul bahwa Depok akan menjadi magnet baru peradaban Islam dunia. Depok sudah punya UI lalu ada UIII, tentu itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kota Depok”

Indonesia bahkan menerima beasiswa Pendidikan dari negara-negara tersebut.

“Negara-negara itu mampu memberikan beasiswa bagi pelajar asing, lalu Indonesia yang memiliki sumber daya yang jauh lebih baik, justru belum ada upaya kesitu. Inilah dengan adanya UIII selain untuk menaikkan citra Islam Indonesia

di mata Dunia, kita akan menunjukkan bahwa Umat Islam Indonesia juga mampu dikenal di kancah Internasional dan mampu memberikan beasiswa pendidikan untuk WNA untuk belajar Islam lebih dalam di Indonesia, yaitu di kampus UIII”, papar Nur Azizah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Mahyeldi-Audy Dilantik sebagai Gubernur Sumbar, Aleg PKS: Selalu Kompak untuk Melayani Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (25/02) --- Presiden RI Joko Widodo hari ini dijadwalkan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat hasil Pilkada 9 Desember 2020, Mahyeldi-Audy Joinaldy di Istana Negara Jakarta, Kamis, (25/02)

Politisi PKS, Nevi Zuairina mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur terpilih usungan PKS ini.

Nevi mengatakan, laksanakan janji kampanye dan kompak terus membangun Sumbar sampai akhir periode. Melayani rakyat merupakan upaya terbaik dalam mengemban amanah.

"Selamat Semoga sukses jalankan amanah. Selamat pak Mahyeldi dan Audy Joinaldy, jalan panjang perjuangan meraih suara masyarakat Sumbar hari ini berbuah manis. Tapi ingat, kerja keras menanti Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Sumbar, terutama memutus mata rantai covid-19

dan menjaga krisis jangan sampai kesengsaraan masyarakat Sumbar semakin meluas," ujar Anggota Komisi VI DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumbar II dari PKS Hj Nevi Zuairina, Kamis (25/02).

Nevi Zuairina pun optimis Mahyeldi-Audy diusung PKS-PPP yang hari ini dilantik Presiden Jokowi mampu memimpin Sumbar keluar dari kungkungan pandemi covid-19.

"26 Maret pas satu tahun covid-19 menasar Sumbar, saat ini penanganan untuk memutus mata rantai covid-19 Sumbar on the track sesuai arahan Kemenkes RI dan berpedoman pada standar WHO. Kamis Mahyeldi-Audy

resmi jadi pemimpin defenitif, Insya Allah duet pemimpin ini mampu untuk bawa Sumbar lebih baik lagi," ujar Nevi.

Menurut Legislator Sumatera Barat ini, Mahyeldi adalah politisi berpengalaman. Karir politiknya diawali dengan menjadi Anggota DPRD Sumbar, kemudian lanjut menjadi Wakil Walikota Padang dan dua kali terpilih sebagai Walikota Padang. Audy Joinaldy tokoh muda yang kenyang pengalaman dalam berusaha hingga menapaki brevet pengusaha muda sukses di nasional.

"Kolaborasi Gubernur dan Wakil Gubernur ini menguntungkan buat Sumbar. Kuncinya kompak jalankan amanah. Laksanakan janji kampanye terus membangun Sumbar. Pancangkan niat layani rakyat sampai akhir periode," tutup Nevi Zuairina mengulang untuk menekankan.



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Selamat Semoga sukses jalankan amanah. Selamat pak Mahyeldi dan Audy Joinaldy, jalan panjang perjuangan meraih suara masyarakat Sumbar hari ini berbuah manis. Tapi ingat, kerja keras menanti Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Sumbar, terutama memutus mata rantai covid-19 dan menjaga krisis jangan sampai kesengsaraan masyarakat Sumbar semakin meluas"

# Serahkan Peralatan dan Mobil Siaga Bencana di Dapil, Amin Ak Ajak Masyarakat Waspada Bencana

**KUTIPAN**

Amin berharap, peralatan dan mobil tersebut mempermudah tim penanggulangan bencana PKS Jember dalam memitigasi korban terdampak bencana alam maupun layanan masyarakat lainnya.

Jember (22/02) — Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak menyerahkan bantuan peralatan siaga bencana alam dan mobil layanan masyarakat kepada DPD PKS Kabupaten Jember, Senin (22/02).

Amin berharap, peralatan dan mobil tersebut mempermudah tim penanggulangan bencana PKS Jember dalam memitigasi korban terdampak bencana alam maupun layanan masyarakat lainnya.

“Sejumlah kecamatan di Kabupaten Jember merupakan wilayah rawan bencana khususnya bencana

hidrometeorologi seperti banjir dan longsor serta angin puting beliung. PKS Insya Allah selalu terdepan dalam membantu korban bencana alam,” ujar Amin.

Selain menyerahkan bantuan peralatan dan mobil siaga bencana, Amin juga mengunjungi rumah warga yang terdampak bencana banjir dan puting beliung beberapa waktu lalu.

Amin dibantu kader PKS Kabupaten Jember merenovasi rumah warga yang terkena puting beliung di Desa Kebonsari, Kecamatan Summersari dan rumah yang terdampak banjir bandang di Desa Pace, Kecamatan Silo,

Kabupaten Jember.

Selanjutnya Amin pun meninjau bangunan pondok pesantren Ma'had Ibnu Katsir di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang sudah 90% rampung. Berkat advokasi Amin Ak, ponpes Al Quran tersebut memperoleh bantuan dana pembangunan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pertamina.

“Alhamdulillah, kini sudah dibangun ruang pembelajaran untuk santri. Semoga bermanfaat dan bisa membuat program belajar di Ponpes ini makin nyaman,” kata Amin.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV

“Sejumlah kecamatan di Kabupaten Jember merupakan wilayah rawan bencana khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor serta angin puting beliung. PKS Insya Allah selalu terdepan dalam membantu korban bencana alam”



# Tempuh Jalanan Rusak, Slamet Tampung Aspirasi Warga Sukabumi & Resmikan Jalan

## KUTIPAN

Sukabumi (26/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet, meresmikan Jalan Usaha Tani

terletak di di Kampung Pamoyanan, Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi pada Selasa, (23/02/2021).

Slamet mengatakan bahwa lokasi tersebut termasuk daerah yang terisolasi dan tidak semua kendaraan dapat memasuki wilayah tersebut. Bahkan ia sendiri harus menumpang mobil offroad milik warga saat menyambangi warga di Kampung Pamoyanan ini.

"Karena akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan biasa," kata Slamet.

Legislator asal Sukabumi ini mengungkapkan bahwa ia mesti menempuh jalanan rusak dan memutar areal

perkebunan teh sepanjang kurang 12 kilometer dari jalan provinsi melewati wilayah Kecamatan Lengkon.

"Saya didampingi Pak Kepala Desa dan di lokasi ini peresmian Jalan Usaha Tani ini saya mendengar harapan dan aspirasi warga. Mayoritas mereka berharap pembangunan jalan untuk menunjang kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Slamet juga meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan jalan rusak tersebut.

"Karena ini menjadi penopang aktivitas ekonomi warga Kampung Pamoyanan," pungkasnya.



**drh. H. SLAMET**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat IV

"Lokasi tersebut termasuk daerah yang terisolasi dan tidak semua kendaraan dapat memasuki wilayah tersebut. Bahkan ia sendiri harus menumpang mobil offroad milik warga saat menyambangi warga di Kampung Pamoyanan ini. Karena akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan biasa,"





*Selamat  
Milad*

Dr. H.

**JAZULI  
JUWAINI** MA

2 MARET

Semoga senantiasa  
diberi kesehatan dan keberkahan  
dalam usianya

# Serap Aspirasi Bersama HNW, Mahasiswa Indonesia di Malaysia **Usulkan** Program Educational Loan

## KUTIPAN

Jakarta (25/02) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat menyampaikan inisiatif bantuan pendidikan untuk Mahasiswa-Mahasiswa terdampak covid-19,

juga menyerap aspirasi mahasiswa Indonesia di Malaysia, yang salah satunya terkait usulan program educational loan (pinjaman pendidikan) di Indonesia.

Seorang Mahasiswa Indonesia program Magister di Malaysia, Alwi mengutarakan bahwa program educational loan, yakni program pinjaman pendidikan untuk siswa atau mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikannya, di Malaysia agar dapat diterapkan juga di Indonesia.

Alwi menilai bahwa program ini dapat memudahkan dan memberi bantuan berupa pinjaman kepada anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, agar nanti dapat maksimal

berkontribusi untuk negeri.

Hal tersebut disampaikan dalam acara serap aspirasi dan inisiasi Bantuan Pendidikan untuk mahasiswa Indonesia di Malaysia bersama Hidayat Nur Wahid, selaku Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II pada Rabu (24/02/2021).

"Di Malaysia ada program pinjaman pendidikan yang dikelola oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Dengan program itu, mahasiswa di Malaysia sebenarnya hanya bermodalkan mau atau tidak mau untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang tinggi, karena difasilitasi negara," ujarnya.

Alwi menuturkan dengan

program tabung atau pinjaman pendidikan di PTPTN itu, mahasiswa Malaysia dapat memperoleh akses pinjaman sesuai kebutuhan, seperti biaya kuliah hingga biaya hidup selama perkuliahan dan sebagainya.

"Bagusnya program semacam ini bisa diterapkan di Indonesia, agar lebih mudah diakses teman-teman dan mempermudah mereka untuk belajar dijenjang yang lebih tinggi," ujarnya.

Program educational loan ini memang banyak diterapkan di sejumlah negara. Para mahasiswa dapat memperoleh pinjaman untuk kuliah dengan persyaratan yang mudah, dan mengembalikan pinjaman tersebut setelah lulus kuliah dan memperoleh pekerjaan. Program ini berbeda dengan program beasiswa yang mensyaratkan nilai yang tinggi dan sebagainya.

Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW menilai usulan atau aspirasi yang disampaikan sangat bagus.

HNW mengatakan bahwa program-program beasiswa,



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Ini usulan yang bagus, karena akses pendidikan yang tinggi itu bukan hanya untuk mereka yang pintar atau memiliki nilai bagus, tetapi juga untuk siapa saja yang punya tekad kuat dan semangat tinggi untuk belajar agar jadi manusia berprestasi dan berkeunggulan, agar makin dapat makin banyak berbakti untuk negeri Indonesia"

seperti yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui dana abadi pendidikan, sudah diterapkan.

"Dalam konteks beasiswa, LPDP sudah menjalankannya.

Namun, memang diberikan kepada para mahasiswa unggulan atau berprestasi," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh

## KUTIPAN

Sumbawa (25/02) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan,

membuka secara resmi kegiatan Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Angkatan I Provinsi NTB di Aula Grand Hotel Sumbawa, Rabu, (24/02).

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI itu juga dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta Kadis Pertanian Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Politisi PKS itu menjelaskan tentang potensi pertanian dan pemernakan di Sumbawa.

"Program ini akan terus berlanjut, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM Pertanian kita di

lapangan." Pangkasnya.

Pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh pertanian.

Seperti yang telah diketahui, di era pandemi seperti sekarang ini yang masih tetap berkontribusi positif meningkatkan perekonomian negara salah satunya adalah sektor pertanian.

"Karenanya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam menyusun perencanaan program pembangunan pertanian memprioritaskan petani dan penyuluh pertanian sebagai lokomotif, penggerak dan pelopor yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, mampu bersaing, dan berwawasan global," ungkap Johan.



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I



Program ini akan terus berlanjut, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM Pertanian kita di lapangan. Pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh pertanian



# Aleg PKS Serahkan Bantuan Program Pembinaan Sepak Bola Usia Muda di Masa Pandemi

## KUTIPAN

Menurut Toriq Hidayat banyak SSB di dapilnya yang tutup terkena imbas akibat pandemi ini. Sehingga banyak pelatih dan asisten pelatih yang perekonomiannya sangat terganggu. Pasalnya, mereka mendapat bayaran hanya saat melatih, itu pun dengan jadwal latihan yang cuma berlangsung 2 kali dalam seminggu

Tasikmalaya (24/02) — Anggota Legislative dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, menyerahkan Bantuan untuk kegiatan pembinaan sepakbola usia muda kepada dua Sekolah Sepak Bola (SSB) di Daerah Pemilihannya, Kecamatan Karangresik Kabupaten Tasikmalaya. (23/02/2021)

“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian PKS terhadap penyelenggaraan kompetisi usia muda dan pengembangan bakat sesuai

dengan Inpres No. 3/2019 dan Permenko PMK No. 1/2020 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional”, ungkap Politisi PKS ini.

Menurut Toriq Hidayat banyak SSB di dapilnya yang tutup terkena imbas akibat pandemi ini. Sehingga banyak pelatih dan asisten pelatih yang perekonomiannya sangat terganggu. Pasalnya, mereka mendapat bayaran hanya saat melatih, itu pun dengan jadwal latihan yang cuma berlangsung

2 kali dalam seminggu.

“SSB di kecamatan Karangresik sempat berniat menggalang dana dari orang tua siswa untuk tetap berjalannya program latihan, tapi niat itu kandas karena ternyata ekonomi mereka juga tidak memadam”, tambahnya.

Namun hendaknya, lanjut Toriq, masa pandemi tidak menjadi hambatan besar bagi penggiat sepak bola usia dini di Indonesia, dalam memaksimalkan potensi dan bakat anak didik. Para pelatih dituntut untuk kreatif memberikan program kepada para pesepak bola muda selama pandemi ini.

“Contohnya dua SSB ini memberikan latihan mandiri secara virtual melalui daring. Pelatih memberikan instruksi melalui aplikasi media online. Selain itu para pemain bisa memberikan raport secara periodik tentang kondisinya kepada Pelatih”, ungkapnya.

Atau sesekali bisa melakukan latihan seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, lanjutnya. Bagaimanapun dengan berolahraga anak-anak dapat beradaptasi untuk menjaga kesehatan di masa Pandemi.

“Minimal kegiatan menjaga kesehatan tetap berjalan melalui salah satunya pembinaan sepakbola usia muda, Harapannya, setelah keadaan normal, Persepakbolaan Nasional akan melaju pesat”, harap Toriq.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI

“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian PKS terhadap penyelenggaraan kompetisi usia muda dan pengembangan bakat sesuai dengan Inpres No. 3/2019 dan Permenko PMK No. 1/2020 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional”

# # RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan  
**Sabtu, pukul 10.00 WIB**  
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



# Amin AK : Tidak Ada Kejelasan Terkait Korupsi Jiwasraya Hingga Saat Ini

## KUTIPAN

Jakarta (23/02) --- Komisi VI Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi terkait rencana kebijakan restrukturisasi oleh asuransi PT. Asuransi Jiwasraya yang disampaikan oleh perwakilan nasabah.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai dana asuransi yang tidak cair dalam kurun waktu tertentu, pemotongan dana asuransi sebesar lima persen, serta pemberlakuan aturan secara sepihak oleh PT. Asuransi Jiwasraya tanpa persetujuan nasabah. Perwakilan nasabah juga mempertanyakan dan menyinggung kelanjutan penyelesaian kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI Amin AK menyatakan bahwa penyelesaian kasus PT. Asuransi Jiwasraya belum tuntas dan tidak memiliki transparansi yang jelas.

“Memang kerugian dari Jiwasraya ini besar dan akan semakin berat seiring bertambahnya polis yang jatuh tempo, sementara penyelesaian kasusnya belum tuntas dan membutuhkan waktu yang lama, termasuk identifikasi tujuan dan jumlah dana yang dikorupsi dulu. Karena dari DPR sendiri lebih memilih membentuk Panitia Kerja (Panja), akhirnya pemahaman kami atas proses penuntasan kasus ini sepotong-sepotong dan juga mungkin kasus ini tidak akan sampai menyentuh seluruh orang yang menikmati dana nasabah Jiwasraya ini secara ilegal,” jawab Amin dalam Hari Aspirasi, Selasa (23/02).

Amin juga menyinggung keinginan PKS sejak awal untuk membentuk pansus untuk

menuntaskan identifikasi kasus korupsi oleh PT. Asuransi Jiwasraya.

“Dari awal PKS ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan permasalahan ini serta mengidentifikasi aset yang harus dikembalikan ke Negara untuk membiayai nasabah, lalu kekurangannya dapat ditambal oleh Negara, tetapi kembali lagi saat ini tidak ada kejelasan sampai mana kasus ini berjalan,” tegas Amin.

Sebagai penutup, Amin menegaskan akan memperjuangkan aspirasi dengan optimal serta menyampaikan terima kasih kepada perwakilan nasabah PT. Asuransi Jiwasraya yang telah menyampaikan aspirasi.

“Kami dari Komisi VI akan menyampaikan skema lebih detail, jangan sampai dana yang sudah digelontorkan kembali dimainkan. Terima kasih aspirasinya, kami hanya bisa berjuang semaksimal mungkin agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara terbaik,” tutup Amin.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

“Dari awal PKS ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan permasalahan ini serta mengidentifikasi aset yang harus dikembalikan ke Negara untuk membiayai nasabah, lalu kekurangannya dapat ditambal oleh Negara, tetapi kembali lagi saat ini tidak ada kejelasan sampai mana kasus ini berjalan”



# Terima Audiensi Asosiasi GKCB, Legislator PKS: Persoalan Taksi Daring Harus Segera Ditangani

## KUTIPAN

Jakarta (25/02) --- Fraksi PKS DPR RI dalam hal ini Anggota Komisi V, Sigit Sosiantomo menerima audiensi secara virtual dari Asosiasi Driver Golden Captain Kompak Bersatu (GCKB) dalam agenda rutin Hari Aspirasi Fraksi PKS.

Asosiasi GKCB meminta Fraksi PKS agar mempertemukan pihaknya dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dan Grabcar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak sejak 2017 dan berdampak pada intimidasi, pengambilan paksa kendaraan, dan penangkapan anggota GCKB.

Legislator asal Dapil Jawa Timur I itu menyambut baik para aspirator tersebut seraya terkejut mendengar kasus yang menimpa mereka.

"Ini luar biasa, saya baru mengerti ada kasus seperti ini. Menurut saya ada beberapa persoalan, yang pertama

persoalan leasing-nya. Kalau leasing kan mestinya atas namanya kepada bapak yang nyicil itu kan bukan kepada perusahaan. Tapi kenapa kok ini atas nama perusahaan, nah itu yang perlu dicari sebab-sebabnya, padahal dia mendapatkan kendaraan itu karena bapak-bapak yang ngangsur," ucap Sigit.

Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu tersebut menegaskan, poinnya adalah persoalan taksi daring yang diubah dari Peraturan Menteri (Permen) 108 menjadi Permen 118 yakni dengan mengubah status kepemilikan mobil dari personal menjadi perusahaan, menurutnya hal ini

bertentangan.

"Awalnya berangkat dari Permen 108 2017 tentang aturan taksi daring. Mungkin itu bagian saya, itu Komisi V. Cuma pada teman-teman TA (Tenaga Ahli) ini kayaknya kasusnya jadi melebar ada masalah HAM, orang ditangkap semena-mena, kayaknya ini kasus Komisi III, trus kasus penarikan kendaraan semena-mena, minta tolong untuk ditindaklanjuti. Kalau kejadiannya sudah di berbagai kota, kita harus seiring dengan pak menteri atau para pimpinan di kepolisian," jelasnya.

Sigit menjelaskan, akan menindaklanjuti sampai pada memanggil Menteri Perhubungan atau Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat untuk mendorong agar tidak membuat Permen abal-abal.

"Ada dua langkah setelah reses ini, langkah pertama adalah mengundang teman-teman ini untuk hiring di DPR di Komisi V dan Komisi III, bisa online. Yang kedua, kita akan minta kepada semua perwakilan (fraksi) untuk hadir



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Ini luar biasa, saya baru mengerti ada kasus seperti ini. Menurut saya ada beberapa persoalan, yang pertama persoalan leasing-nya. Kalau leasing kan mestinya atas namanya kepada bapak yang nyicil itu kan bukan kepada perusahaan. Tapi kenapa kok ini atas nama perusahaan, nah itu yang perlu dicari sebab-sebabnya, padahal dia mendapatkan kendaraan itu karena bapak-bapak yang ngangsur"

pada kesempatan ini. Saya kira ini kasus yang harus segera ditangani, bahaya ini. Minta tolong datanya dilengkapi agar kita bisa memperdalam, atau

bahan yang super lengkapnya dibawa saat hiring dengan DPR itu. Kita berjuang agar apa yang menjadi harapan bapak-bapak bisa tercapai." tutupnya.

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





# Anggota FPKS: Bersama Melayani Rakyat bukan Sekedar Tagline, Tapi Jadi Ruh dan Sistem

## KUTIPAN

Ketua Bidang Keuangan dan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ini menandakan bahwa, PKS di seluruh Indonesia dan kader-kadernya akan selalu bersama rakyat Indonesia, berkhidmah untuk mereka dengan seluruh komponen bangsa, menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta (25/02) — Dalam sebuah wawancara dengan Radio Idola Semarang, Anis Byarwati menegaskan bahwa tagline Bersama Melayani Rakyat, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan sekedar tagline, tetapi menjadi ruh dan sistem dalam PKS.

Politisi senior dari Fraksi PKS ini memaparkan bahwa PKS dan kader-kadernya selalu menjadi yang pertama dan terdepan dalam berkhidmah kepada rakyat Indonesia.

"Tidak hanya di masa kampanye Pemilu, namun sepanjang tahun, hadir membersamai rakyat Indonesia, terlebih di saat bencana, seperti

banjir, gempa bumi, musibah kebakaran maupun pandemi covid-19 dan yang lainnya," ungkapnya.

Aleg dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI 1 Jakarta Timur ini mencontohkan sebagaimana yang dilakukannya saat turun ke masyarakat di DKI Jakarta.

"Kami turun menemui masyarakat bersama struktur pemerintah, mulai dari struktur RT, RW, Kelurahan, Kecamatan bahkan bersama Wakil Gubernur. Kami mendengarkan masalah yang dihadapi warga DKI Jakarta, masukan dan aspirasi mereka. Kemudian bermusyawarah dengan struktur dan dinas terkait untuk

menghadirkan solusi terbaik untuk warga DKI," pungkasnya.

Anggota Komisi XI ini menambahkan sebagaimana ia dengan tim bertemu dengan konstituen yang terus membersamai.

"Setiap kami bertemu warga, kami disambut hangat, bahkan mereka memberikan apresiasi untuk PKS dan kader-kadernya yang senantiasa bahu membahu membersamai mereka. Khidmah yang kami hadirkan dari ketulusan hati, sampai ke dalam hati mereka dan kami yakin akan terukir dalam benak mereka in sya Allah," terang Anis.

Ketua Bidang Keuangan dan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ini menandakan bahwa, PKS di seluruh Indonesia dan kader-kadernya akan selalu bersama rakyat Indonesia, berkhidmah untuk mereka dengan seluruh komponen bangsa, menuju Indonesia yang lebih baik.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Setiap kami bertemu warga, kami disambut hangat, bahkan mereka memberikan apresiasi untuk PKS dan kader-kadernya yang senantiasa bahu membahu membersamai mereka. Khidmah yang kami hadirkan dari ketulusan hati, sampai ke dalam hati mereka dan kami yakin akan terukir dalam benak mereka in sya Allah,"

# Banjir Besar di Jabodetabek, Perempuan PKS: **Bantu Keluarga Tetap Sehat**

## KUTIPAN

Jakarta -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati bersama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) DKI Jakarta, menyalurkan bantuan logistik, obat-obatan, nutrisi sehat dan kebutuhan ibu dan anak untuk korban banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan dan Timur

Mufida turun bersama dengan BPKK DKI Jakarta dan pengurus setempat, Ahad (21/2/2021).

Mufida dan rombongan turun di titik lokasi banjir, meninjau posko dan memberikan bantuan antara lain di Pondok Pinang, Petogogan, Kebayoran Lama Utara dan Cipinang Jakarta Timur.

Mufida mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi kader PKS untuk terjun membantu masyarakat yang tengah dilanda kesulitan, termasuk banjir yang melanda Jabodetabek. "Kami ingin memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya keluarga keluarga yang terkena

musibah banjir," jelas Mufida.

"BPKK melalui RKI telah mendirikan dapur umum di posko-posko yang didirikan oleh PKS. Kebutuhan makanan siap saji yang sehat, menjadi penting saat kondisi air meluap seperti saat ini. Banyak sebenarnya kader PKS yang juga menjadi korban banjir tetapi tetap aktif di dapur umum untuk melayani masyarakat," papar Mufida.

Anggota Komisi IX DPR dari Dapil DKI Jakarta II ini mengingatkan agar warga yang bergungsi diperhatikan secara khusus kondisi kesehatan dan tempat pengungsian. Mengingat Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid-19,

Mufida mengingatkan di tempat-tempat pengungsian dan posko-posko bantuan, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk meminimalisir terjadinya penularan covid-19 yang bisa membuat keluarga semakin menderit.

"Bantu keluarga keluarga Korban banjir agar tetap terjaga kesehatannya dari penyakit akibat banjir maupun potensi penularan Covid-19 di lokasi pengungsian. Pastikan di lokasi pengungsian utama terdapat fasilitas kesehatan dan tempat beristirahat warga dengan tetap menjaga potokol kesehatan, tidak hanya ketersediaan makanan," ujarnya.

Dirinya berharap banjir bisa segera surut dan petugas bersama-sama warga bisa membersihkan rumahnya sehingga dapat kembali ke rumahnya dan tidak terlalu lama di pengungsian.

Mufida juga meminta, jika perlu disediakan tempat khusus isolasi Covid-19 bagi warga yang kebanjiran dan sedang menjalani isolasi mandiri. Selain itu, perlu juga dilakukan monitoring ketat terhadap kesehatan masyarakat yang bergungsi, dengan lakukan



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Ketua Bidang BPKK DPP PKS

“Jangan sampai tempat pengungsian menjadi tempat munculnya klaster baru penularan Covid-19. Bisa menerapkan tempat pengungsian yang dilengkapi fasilitas kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti di GOR Otista”

screening gejala Covid 19.

Kemudian sebelum kembali ke rumah, baiknya dilakukan rapid tes antigen, khususnya bagi keluarga di pengungsian yang menunjukkan gejala mengarah ke Covid-19.

Tidak seperti penanganan pengungsi di banjir sebelumnya, untuk banjir kali ini, dirinya meminta Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan memberikan perhatian lebih besar terhadap

aspek kesehatan pengungsi ini.

“Jangan sampai tempat pengungsian menjadi tempat munculnya klaster baru penularan Covid-19. Bisa menerapkan tempat pengungsian yang dilengkapi fasilitas kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti di GOR Otista,” ungkap Mufida.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***